

Posisi Relatif Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Maluku Utara 2025

DATA IKG TAHUN 2024 (DIPUBLIKASIKAN TAHUN 2025)

No.	Kabupaten/Kota	IKG (2025) (Data 2024)	Posisi Relatif
1	Kota Tidore Kepulauan	0,414	Paling Rendah
2	Kota Ternate	0,438	Sangat Rendah
3	Kabupaten Pulau Morotai	0,480	Rendah
4	Kabupaten Halmahera Utara	0,509	Rendah
5	Kabupaten Halmahera Barat	0,542	Sedang
6	Kabupaten Pulau Taliabu	0,577	Sedang
7	Kabupaten Halmahera Selatan	0,579	Sedang
8	Kabupaten Kepulauan Sula	0,581	Sedang
9	Kabupaten Halmahera Timur	0,601	Tinggi
10	Kabupaten Halmahera Tengah	0,620	Paling Tinggi
Provinsi Maluku Utara		0,508	Rata-rata Provinsi

Keterangan:

IKG mengukur ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi:

Kesehatan Reproduksi | Pemberdayaan | Partisipasi Pasar Kerja

Sumber:

Badan Pusat Statistik (BPS)
Berita Resmi Statistik IKG 2024,
dipublikasikan tahun 2025.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu, *Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka*; Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka*; berdasarkan **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)**.

b. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** Kabupaten Pulau Taliabu selama periode **2018–2025** menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai IKG tercatat sebesar **0,590 pada tahun 2019**, kemudian mengalami penurunan menjadi **0,583 pada tahun 2020**. Penurunan nilai IKG tersebut merupakan perkembangan yang positif karena menunjukkan bahwa ketimpangan antara perempuan dan laki-laki mulai berkurang.

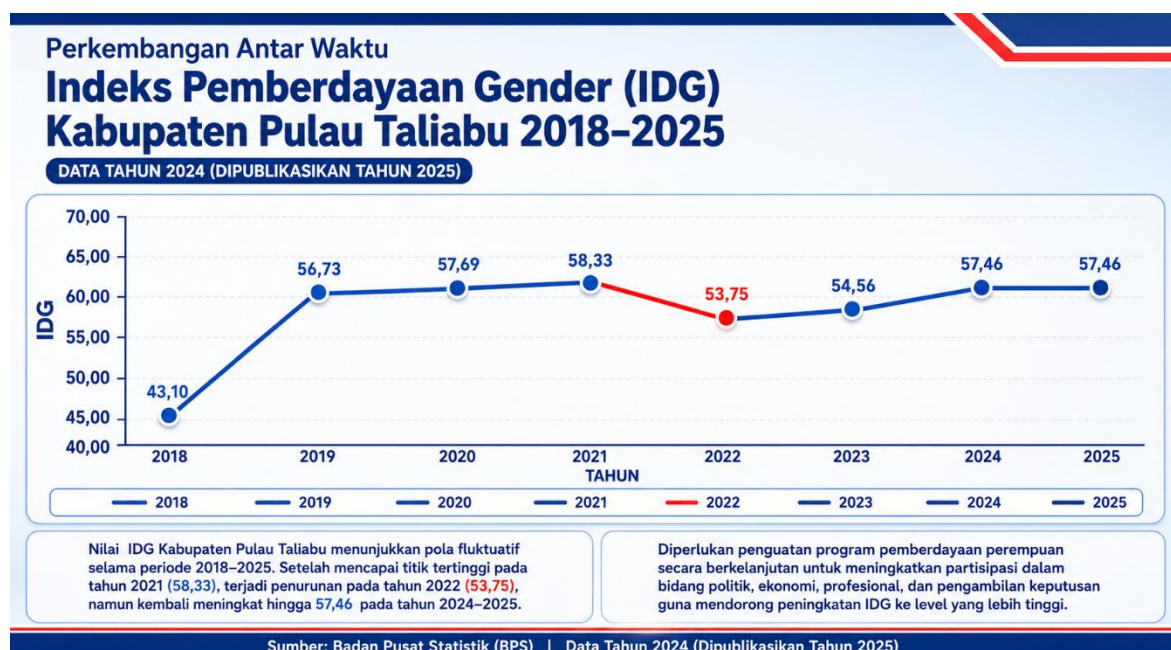
Namun demikian, pada periode **2021–2023** nilai IKG kembali meningkat secara berturut-turut, yaitu menjadi **0,608 pada tahun 2021**, **0,613 pada tahun 2022**, dan mencapai **0,617 pada tahun 2023**. Peningkatan nilai IKG tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan gender kembali melebar, terutama pada aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan partisipasi perempuan di pasar kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai tantangan pembangunan yang terjadi pada periode tersebut turut memengaruhi capaian kesetaraan gender di Kabupaten Pulau Taliabu.

Perkembangan yang cukup menggembirakan terjadi pada **tahun 2024** (dipublikasikan pada tahun 2025), ketika nilai IKG berhasil turun menjadi **0,577**. Penurunan sebesar **0,040 poin** dibandingkan tahun sebelumnya merupakan perbaikan yang cukup signifikan dan menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan yang responsif gender mulai memberikan dampak terhadap pengurangan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan **tahun dasar 2019**, nilai IKG Kabupaten Pulau Taliabu mengalami penurunan dari **0,590 menjadi 0,577**, atau membaik sebesar **0,013 poin**. Meskipun perbaikannya belum terlalu besar, arah perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesetaraan gender di Kabupaten Pulau Taliabu mulai bergerak ke arah yang lebih baik.

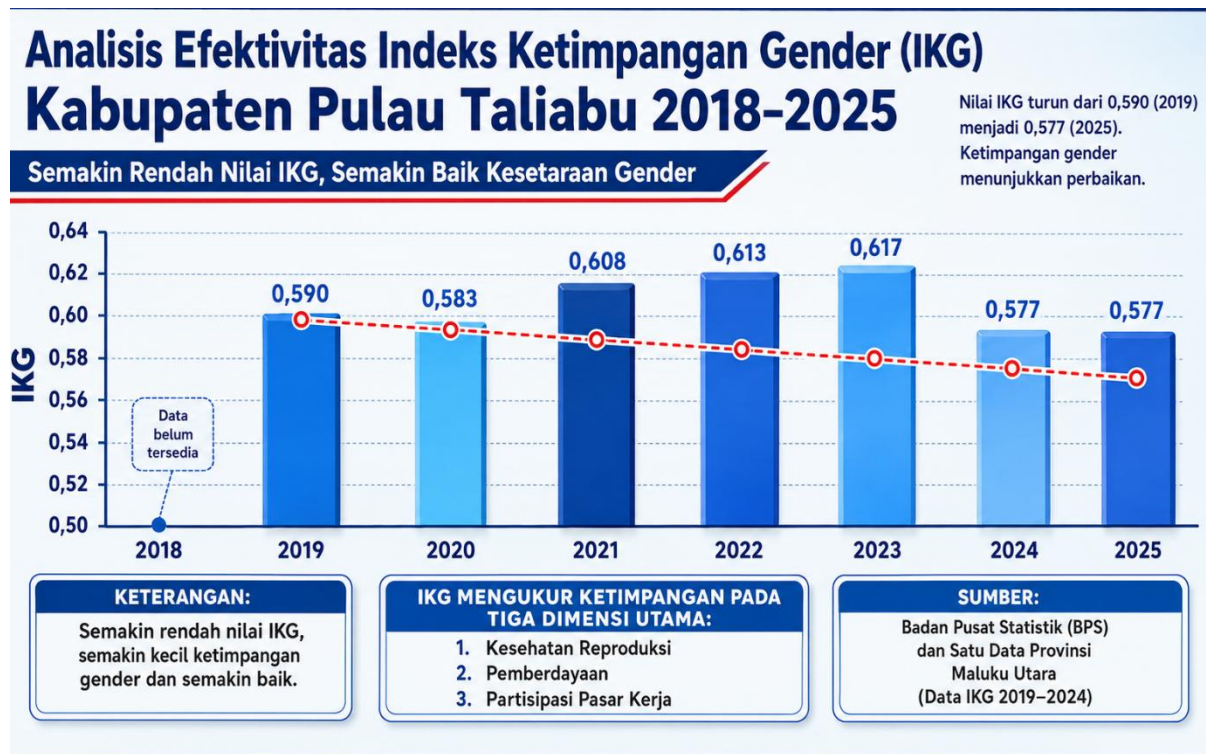
Walaupun demikian, nilai **IKG Kabupaten Pulau Taliabu masih tergolong relatif tinggi** dan masih berada di atas rata-rata **Provinsi Maluku Utara**, sehingga menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender masih menjadi salah satu tantangan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi untuk mempercepat penurunan IKG melalui peningkatan kualitas kesehatan reproduksi perempuan, perluasan akses pendidikan, peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perluasan kesempatan kerja yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Dengan penguatan implementasi **Pengarusutamaan Gender (PUG)** serta sinergi lintas sektor, diharapkan **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** Kabupaten Pulau Taliabu dapat terus menurun pada tahun-tahun mendatang. Penurunan IKG akan mencerminkan semakin kecilnya kesenjangan gender, meningkatnya kualitas pembangunan manusia, serta terwujudnya pembangunan daerah yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu, *Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka*; Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka*; berdasarkan **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)**.

c. Efektivitas



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu, *Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka*; Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka*; berdasarkan **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)**.

Analisis efektivitas **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** Kabupaten Pulau Taliabu selama periode **2018–2025** menunjukkan bahwa pembangunan yang responsif gender telah memberikan hasil yang mulai terlihat, meskipun perkembangannya belum berlangsung secara konsisten. Mengingat **semakin rendah nilai IKG menunjukkan semakin kecil tingkat ketimpangan gender**, maka penurunan nilai IKG merupakan indikator positif terhadap keberhasilan pembangunan yang inklusif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai **IKG Kabupaten Pulau Taliabu menurun dari 0,590 pada tahun 2019 menjadi 0,577 pada tahun 2024** (dipublikasikan pada tahun 2025), atau mengalami **penurunan sebesar 0,013 poin**. Walaupun penurunannya relatif kecil, capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pembangunan mulai mampu mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.

Namun demikian, efektivitas pembangunan selama periode tersebut belum berlangsung secara stabil. Setelah mengalami perbaikan pada tahun 2020, nilai IKG kembali meningkat hingga mencapai **0,617 pada tahun 2023**, yang menunjukkan bahwa ketimpangan gender sempat melebar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, belum optimalnya akses perempuan terhadap pekerjaan formal dan jabatan profesional, serta masih adanya kesenjangan pada aspek kesehatan reproduksi dan partisipasi ekonomi.

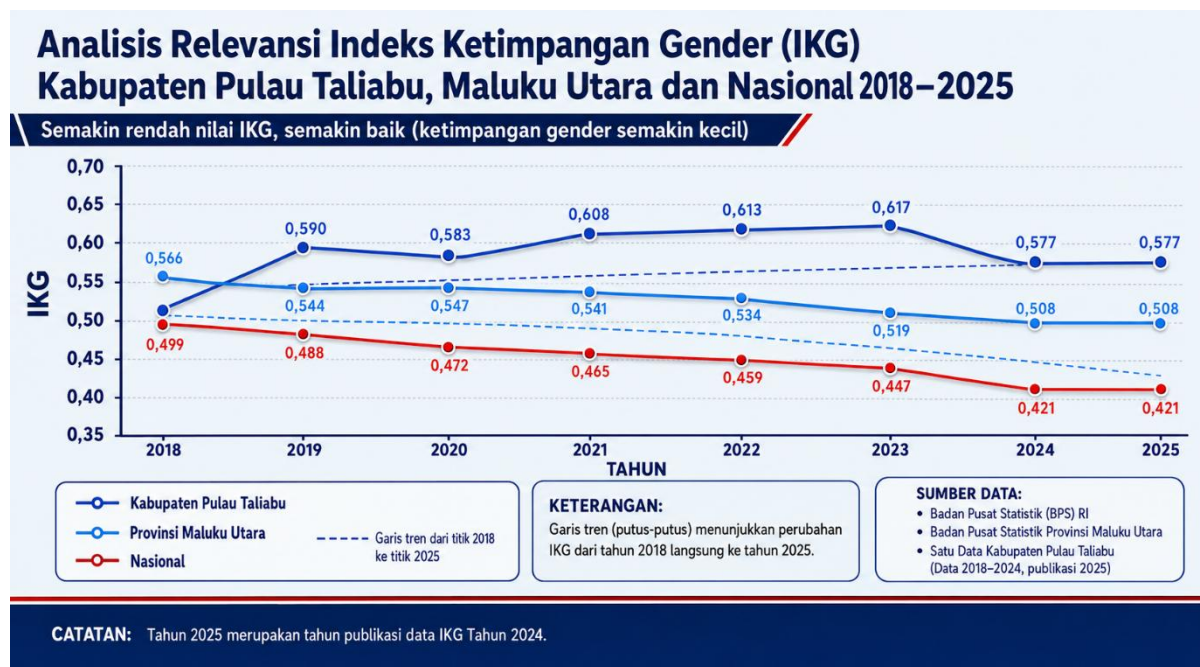
Perbaikan yang cukup signifikan terjadi pada **tahun 2024**, ketika nilai IKG berhasil turun menjadi **0,577**. Penurunan sebesar **0,040 poin** dibandingkan tahun sebelumnya merupakan capaian yang cukup baik dan menunjukkan bahwa berbagai program pemberdayaan perempuan, peningkatan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta peningkatan kesempatan kerja mulai memberikan dampak terhadap penurunan ketimpangan gender di Kabupaten Pulau Taliabu.

Meskipun demikian, **nilai IKG Kabupaten Pulau Taliabu masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara**, sehingga efektivitas pembangunan gender masih perlu terus ditingkatkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya mampu memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pembangunan ke depan perlu difokuskan pada penguatan **Pengarusutamaan Gender (PUG)** di seluruh perangkat daerah, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi perempuan, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, perluasan kesempatan kerja formal bagi perempuan, peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan publik dan pengambilan keputusan, serta penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan UMKM dan kewirausahaan.

Secara keseluruhan, **efektivitas pembangunan dalam menurunkan Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan arah yang positif**, yang ditandai dengan **penurunan nilai IKG dari 0,590 pada tahun 2019 menjadi 0,577 pada tahun 2025**. Capaian tersebut menjadi indikasi bahwa kebijakan pembangunan mulai mampu mengurangi kesenjangan gender. Ke depan, konsistensi pelaksanaan program yang responsif gender dan sinergi antarperangkat daerah perlu terus diperkuat agar penurunan IKG dapat berlangsung lebih cepat, sehingga tercipta pembangunan yang semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

d. Relevansi



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu, *Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka*; Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka*; berdasarkan **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)**.

Analisis relevansi **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan tingkat nasional selama periode **2018–2025** menunjukkan bahwa ketiga wilayah memiliki arah perkembangan yang sama, yaitu cenderung mengalami **penurunan nilai IKG**. Mengingat **semakin rendah nilai IKG menunjukkan semakin kecil ketimpangan gender**, maka tren tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

Kabupaten Pulau Taliabu mencatat **IKG sebesar 0,590 pada tahun 2019** dan menurun menjadi **0,577 pada tahun 2024** (dipublikasikan pada tahun 2025). Meskipun mengalami perbaikan pada akhir periode, perkembangan IKG Kabupaten Pulau Taliabu masih menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Nilai IKG sempat meningkat hingga **0,617 pada tahun 2023**, sebelum akhirnya turun kembali pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan ketimpangan gender belum berlangsung secara konsisten.

Di sisi lain, **Provinsi Maluku Utara** menunjukkan tren yang lebih stabil dengan penurunan IKG dari **0,566 pada tahun 2018** menjadi **0,508 pada tahun 2024**, sedangkan **nasional** mengalami penurunan dari **0,499 menjadi 0,421** pada periode yang sama. Penurunan yang lebih konsisten di tingkat provinsi dan nasional menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan perempuan telah berjalan lebih efektif dibandingkan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Apabila dibandingkan secara langsung, **nilai IKG Kabupaten Pulau Taliabu masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku Utara maupun nasional pada seluruh periode pengamatan**. Pada tahun 2025, selisih IKG Kabupaten Pulau Taliabu terhadap **Provinsi Maluku Utara mencapai sekitar 0,069 poin**, sedangkan terhadap **nasional mencapai sekitar 0,156 poin**. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif lebih besar dibandingkan wilayah pembandingan.

Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa perempuan di Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi tantangan dalam memperoleh kesempatan yang setara, terutama pada aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, tingkat pendidikan, serta partisipasi di pasar kerja. Oleh karena itu, upaya percepatan pembangunan yang responsif gender masih perlu terus diperkuat agar kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dapat diperkecil.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperkuat implementasi **Pengarusutamaan Gender (PUG)** melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi, perluasan akses pendidikan bagi perempuan, peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan publik dan lembaga legislatif, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM dan kewirausahaan, serta perluasan kesempatan kerja yang setara. Kebijakan tersebut perlu didukung oleh perencanaan dan penganggaran yang responsif gender agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, **relevansi perkembangan IKG Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren yang membaik**, namun laju perbaikannya masih lebih lambat dibandingkan Provinsi Maluku Utara dan nasional. Dengan penguatan kebijakan yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan gender secara menyeluruh, diharapkan nilai **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** Kabupaten Pulau Taliabu dapat terus menurun sehingga kualitas pembangunan manusia meningkat, kesetaraan gender semakin terwujud, dan pembangunan daerah menjadi lebih inklusif, adil, serta berkelanjutan.

3.6.4. Masalah Bidang Kesetaraan Gender

Analisis bidang **Kesetaraan Gender** Kabupaten Pulau Taliabu dilakukan berdasarkan tiga indikator utama, yaitu **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**, **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**, dan **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**. Ketiga indikator tersebut saling melengkapi dalam menggambarkan kondisi kesetaraan gender di daerah. **IPG** mengukur kesenjangan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki, **IDG** mengukur tingkat pemberdayaan perempuan dalam bidang politik dan ekonomi, sedangkan **IKG** mengukur tingkat ketimpangan gender pada aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi pasar kerja. Analisis dilakukan melalui empat aspek, yaitu **Posisi Relatif, Perkembangan Antar Waktu, Efektivitas, dan Relevansi**.

MASALAH BIDANG KESETARAAN GENDER

INDIKATOR UTAMA : INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

IPG mengukur kesenjangan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki.



KESIMPULAN

IPG Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, namun **masih berada di bawah Provinsi Maluku Utara dan nasional**. Diperlukan penguatan program yang mendukung kesetaraan akses dan kesempatan bagi perempuan di seluruh aspek pembangunan untuk mempercepat peningkatan IPG.

MASALAH BIDANG KESETARAAN GENDER

INDIKATOR UTAMA : INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

IDG mengukur tingkat pemberdayaan perempuan dalam bidang politik dan ekonomi.



KESIMPULAN

IDG Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perbaikan namun masih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan secara lebih optimal dan konsisten.

MASALAH BIDANG KESETERAAN GENDER

INDIKATOR UTAMA : INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

IKG mengukur ketimpangan gender pada tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi pasar kerja.
Semakin rendah nilai IKG, semakin kecil ketimpangan gender (semakin baik).



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu, *Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka*; Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka*; berdasarkan **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)**.

Permasalahan Utama Bidang Kesetaraan Gender

Berdasarkan hasil analisis ketiga indikator tersebut, beberapa permasalahan strategis bidang kesetaraan gender di Kabupaten Pulau Taliabu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara dan nasional**, yang menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia perempuan masih belum setara dengan laki-laki.
2. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah**, yang mengindikasikan masih terbatasnya keterwakilan perempuan dalam jabatan politik, pengambilan keputusan, pekerjaan profesional, dan aktivitas ekonomi produktif.
3. **Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional**, sehingga menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi tantangan pembangunan daerah.
4. **Peningkatan indikator gender belum berlangsung secara konsisten**, terlihat dari masih adanya fluktuasi pada nilai IDG dan IKG dalam beberapa tahun terakhir.
5. **Partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi masih perlu ditingkatkan**, terutama melalui penguatan UMKM perempuan, kewirausahaan, akses terhadap pembiayaan, dan kesempatan kerja formal.
6. **Keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan jabatan strategis masih terbatas**, sehingga peran perempuan dalam proses pembangunan belum optimal.



7. **Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)** di seluruh perangkat daerah masih perlu diperkuat melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender.

Kesimpulan

Secara umum, kondisi **kesetaraan gender di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren yang semakin membaik**, ditandai dengan meningkatnya **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** dan **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** serta mulai menurunnya **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** pada akhir periode pengamatan. Namun demikian, capaian ketiga indikator tersebut masih berada di bawah rata-rata **Provinsi Maluku Utara** dan **nasional**, sehingga menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih menjadi salah satu isu strategis pembangunan daerah.

Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan ke depan perlu difokuskan pada **peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, perluasan kesempatan kerja yang setara, peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, penguatan layanan kesehatan reproduksi, serta optimalisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)**. Melalui upaya tersebut diharapkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender dapat terwujud, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat dan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya **SDGs Tujuan 5 (Kesetaraan Gender)**, dapat tercapai secara optimal.

3.7. ANALISIS KARAKTERISTIK MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga mampu hidup layak, mengembangkan diri, serta melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal. Analisis karakteristik masalah kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi, penyebab, dan tingkat permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Karakteristik kesejahteraan sosial suatu daerah umumnya diukur melalui berbagai indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, antara lain persentase penduduk miskin, jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), akses terhadap pelayanan dasar, cakupan perlindungan sosial, serta tingkat kerentanan sosial masyarakat. Indikator-indikator tersebut memberikan gambaran mengenai kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pelayanan dasar, dan menghadapi berbagai risiko sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial pada umumnya ditandai oleh masih adanya kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, lanjut usia terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban bencana, penyandang masalah sosial, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Kondisi tersebut sering kali dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta keterbatasan kapasitas ekonomi rumah tangga.

Selain faktor ekonomi, kesejahteraan sosial juga dipengaruhi oleh faktor demografi, kondisi geografis, budaya, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan sosial yang berkualitas. Daerah dengan wilayah kepulauan atau aksesibilitas yang terbatas, seperti Kabupaten Pulau Taliabu, menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjangkau pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan sosial tidak hanya diarahkan pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan pelayanan dasar yang merata, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan



terhadap kelompok rentan, serta penguatan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial memerlukan pendekatan yang terpadu melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.

Analisis karakteristik masalah kesejahteraan sosial juga menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial, seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, perlindungan anak dan perempuan, pemberdayaan penyandang disabilitas, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat, mengurangi kerentanan sosial, dan memperkuat inklusi sosial bagi seluruh kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, analisis karakteristik masalah kesejahteraan sosial perlu diarahkan pada identifikasi kelompok masyarakat yang paling rentan, faktor-faktor penyebab permasalahan sosial, efektivitas program perlindungan sosial yang telah dilaksanakan, serta peluang penguatan pemberdayaan masyarakat. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan analisis yang komprehensif, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan, menurunkan kesenjangan sosial, memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, meningkatkan kualitas pelayanan sosial, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).

3.7.1. Jumlah Penduduk Disabilitas

Jumlah Penduduk Disabilitas merupakan banyaknya penduduk yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pengertian tersebut mengacu pada **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**, yang mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga menghadapi hambatan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, **Jumlah Penduduk Disabilitas** merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang digunakan untuk mengidentifikasi besarnya kelompok masyarakat yang memerlukan perlindungan sosial, pelayanan publik yang inklusif, rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan, serta aksesibilitas terhadap berbagai fasilitas umum.

Penduduk penyandang disabilitas meliputi berbagai ragam disabilitas, antara lain:

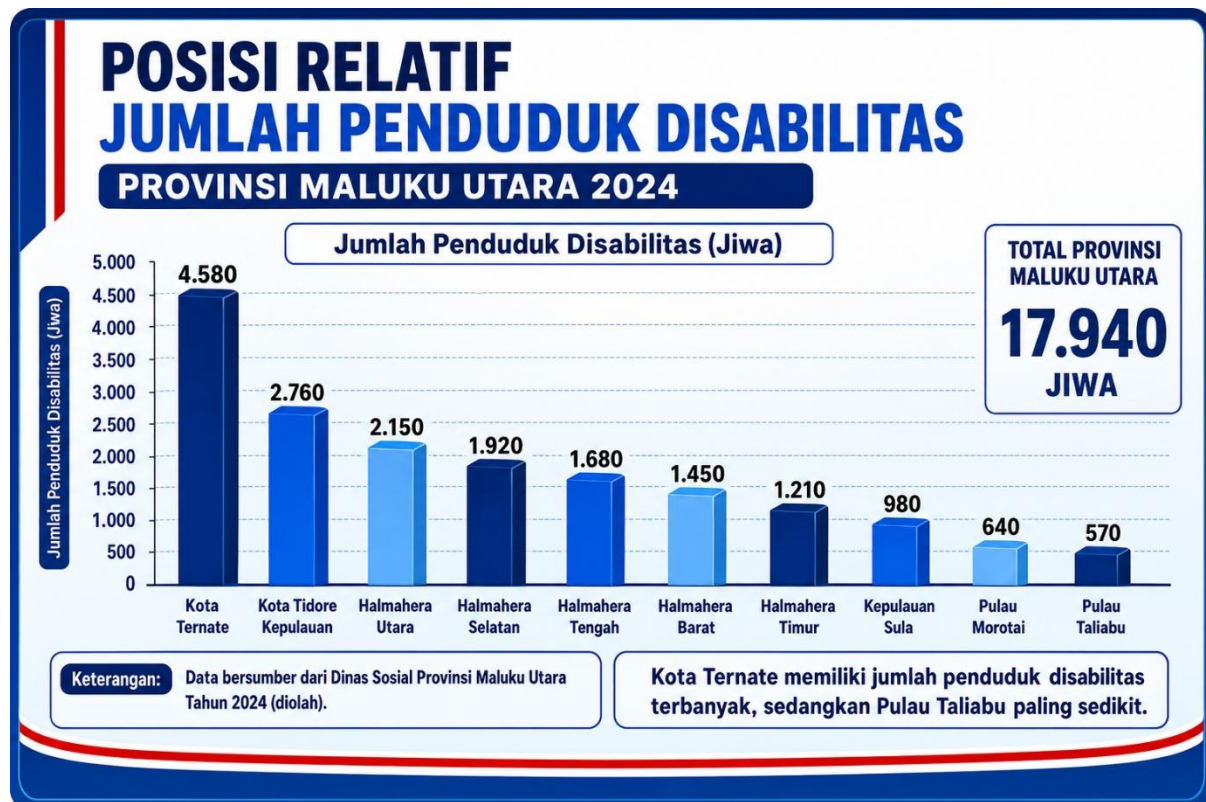
- Disabilitas fisik.
- Disabilitas intelektual.
- Disabilitas mental.
- Disabilitas sensorik (tunanetra, tunarungu, dan wicara).
- Disabilitas ganda atau kombinasi beberapa jenis disabilitas.

Semakin besar jumlah penyandang disabilitas pada suatu wilayah, semakin besar pula kebutuhan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan yang inklusif, ramah disabilitas, serta menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada penyediaan bantuan sosial, tetapi juga pada peningkatan kemandirian penyandang disabilitas melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, kewirausahaan, rehabilitasi sosial, serta penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel.

Dalam konteks pembangunan yang inklusif, keberadaan data jumlah penduduk disabilitas sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran, dan penetapan program prioritas agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal (*no one left behind*). Data tersebut juga menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan inklusif, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas.

Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas perlu dilakukan melalui penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan kerja yang setara, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan implementasi kebijakan pembangunan yang inklusif. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, memperkuat kemandirian mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkeadilan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan).

a. Posisi Relatif



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*; Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara; Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah



Berdasarkan data **Jumlah Penduduk Disabilitas Provinsi Maluku Utara Tahun 2024**, terlihat bahwa persebaran penyandang disabilitas di setiap kabupaten/kota menunjukkan variasi yang cukup besar. Perbedaan tersebut mencerminkan karakteristik demografi, jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.

Kota Ternate merupakan daerah dengan jumlah penduduk disabilitas terbanyak di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang lebih besar serta berfungsinya Kota Ternate sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi provinsi sehingga konsentrasi penduduk, termasuk penyandang disabilitas, relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Sebaliknya, **Kabupaten Pulau Taliabu** termasuk salah satu daerah dengan jumlah penduduk disabilitas yang relatif lebih sedikit dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara. Meskipun demikian, jumlah yang lebih kecil **tidak serta-merta menunjukkan bahwa tingkat permasalahan disabilitas lebih rendah**. Kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan, keterbatasan akses pelayanan dasar, serta kemungkinan belum optimalnya pendataan dapat memengaruhi jumlah penyandang disabilitas yang tercatat.

Dari perspektif pembangunan kesejahteraan sosial, jumlah penyandang disabilitas harus dipandang sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang inklusif. Semakin banyak penyandang disabilitas yang teridentifikasi, semakin besar pula kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan inklusif, rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, bantuan sosial, serta penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas.

Bagi **Kabupaten Pulau Taliabu**, tantangan utama bukan hanya terkait jumlah penyandang disabilitas, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem pendataan penyandang disabilitas agar lebih akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan.

Secara keseluruhan, analisis posisi relatif menunjukkan bahwa **peningkatan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas harus menjadi prioritas pembangunan kesejahteraan sosial**, tidak hanya berorientasi pada jumlah penyandang disabilitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, kemandirian, aksesibilitas, dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat semakin inklusif, berkeadilan, dan mendukung prinsip **"No One Left Behind"** dalam pencapaian **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**.

b. Perkembangan Antar Waktu

Berdasarkan perkembangan **Jumlah Penduduk Disabilitas Kabupaten Pulau Taliabu** selama periode **2023–2025**, terlihat adanya kecenderungan peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang tercatat dalam basis data pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendataan dan identifikasi penyandang disabilitas semakin baik, sehingga lebih banyak penyandang disabilitas yang berhasil terdata dan memperoleh akses terhadap berbagai program pelayanan sosial.

Peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang tercatat **tidak selalu menunjukkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas secara riil**, tetapi dapat mencerminkan meningkatnya kualitas pendataan, pemutakhiran data, serta semakin luasnya jangkauan pelayanan pemerintah kepada kelompok rentan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan menetapkan program perlindungan maupun pemberdayaan penyandang disabilitas.

Dari perspektif pembangunan kesejahteraan sosial, peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang terdata juga menunjukkan semakin besarnya kebutuhan terhadap pelayanan yang inklusif, antara lain pendidikan inklusif, layanan kesehatan yang ramah disabilitas, rehabilitasi sosial, bantuan sosial,

pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Meskipun demikian, tantangan pembangunan ke depan tidak hanya terletak pada peningkatan kualitas pendataan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan penyandang disabilitas agar mereka mampu hidup secara mandiri, produktif, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat sinergi antara perangkat daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Secara keseluruhan, perkembangan jumlah penduduk disabilitas yang tercatat selama periode **2023–2025** menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pemerintah dalam mengidentifikasi kelompok rentan. Ke depan, data tersebut harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas perlindungan sosial, memperluas akses terhadap pelayanan dasar, memperkuat pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, serta memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas secara setara sesuai prinsip **"No One Left Behind"** dalam pencapaian **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)**.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*; Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara; Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

c. Efektivitas

Analisis efektivitas terhadap **Jumlah Penduduk Disabilitas Kabupaten Pulau Taliabu** menunjukkan bahwa selama periode **2023–2025** terjadi peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang tercatat dalam sistem pendataan pemerintah daerah. Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas secara riil, tetapi lebih mencerminkan meningkatnya kualitas pendataan, identifikasi, serta jangkauan pelayanan pemerintah terhadap kelompok penyandang disabilitas.



Peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang terdata mengindikasikan bahwa pemerintah daerah semakin mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum teridentifikasi. Dengan semakin lengkapnya basis data, penyusunan kebijakan, penyaluran bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan inklusif, serta program pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Dari perspektif efektivitas pembangunan, peningkatan kualitas pendataan merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang inklusif. Namun demikian, efektivitas pembangunan tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah penyandang disabilitas yang tercatat, tetapi juga dari sejauh mana mereka memperoleh akses terhadap pelayanan dasar, kesempatan kerja, pendidikan, pelatihan keterampilan, perlindungan sosial, serta fasilitas publik yang ramah disabilitas.

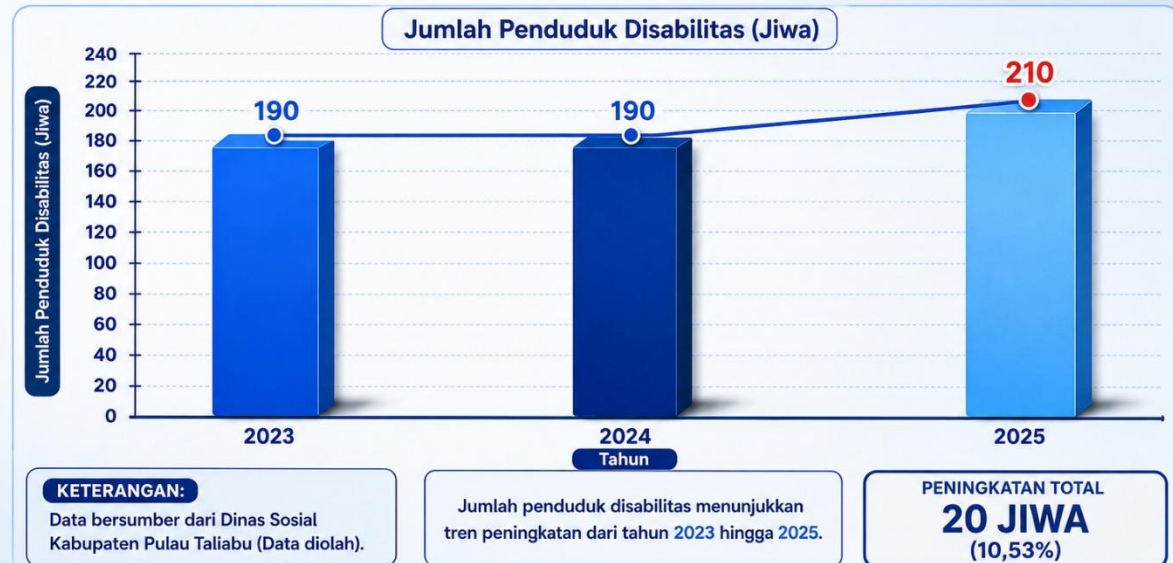
Oleh karena itu, peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang terdata harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan yang diberikan. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu terus memperkuat koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, serta perangkat daerah lainnya agar penyandang disabilitas memperoleh pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Selain itu, pengembangan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, dukungan UMKM, akses terhadap pembiayaan, serta perluasan kesempatan kerja yang inklusif perlu terus ditingkatkan agar penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima bantuan sosial, tetapi juga mampu hidup mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, efektivitas pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang positif melalui peningkatan kualitas pendataan penyandang disabilitas. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial, dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah akan semakin inklusif, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip **"No One Left Behind"** dalam pencapaian **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)**.

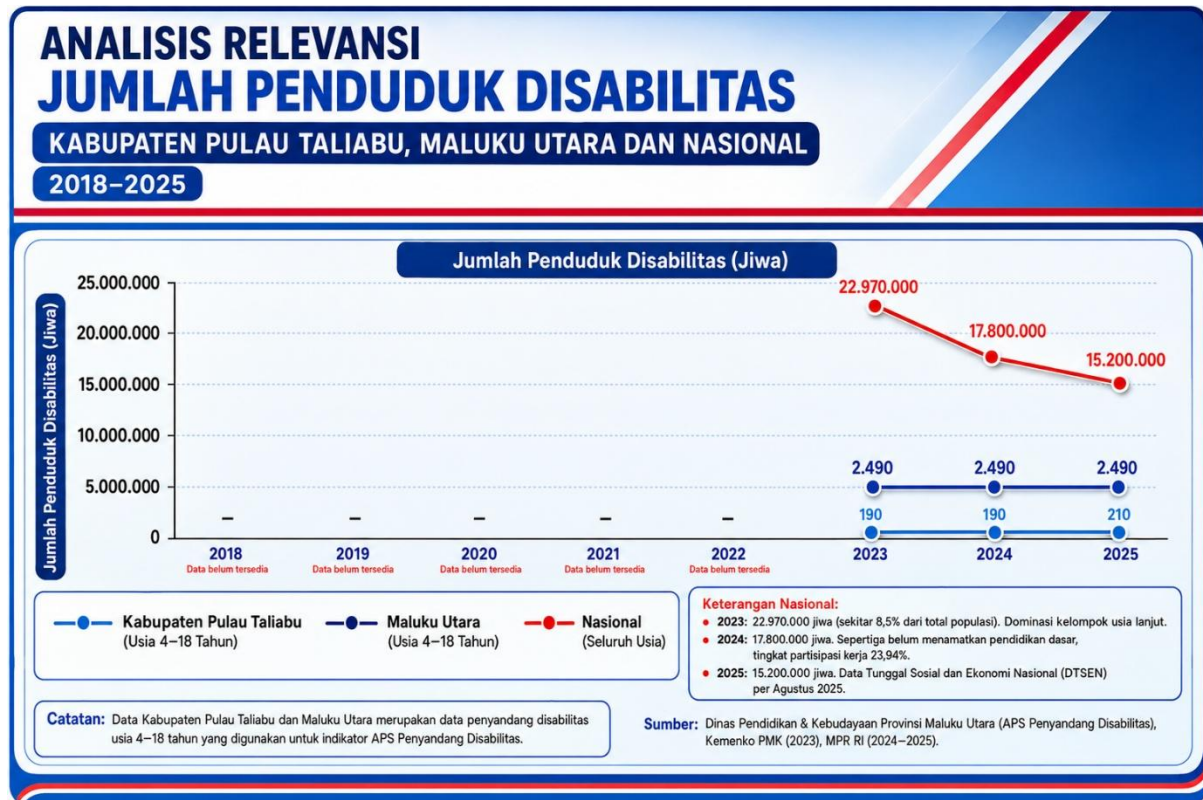
ANALISIS EFEKTIVITAS JUMLAH PENDUDUK DISABILITAS

KABUPATEN PULAU TALIABU 2023–2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*; Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara; Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

d. Relevansi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*; Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara; Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

Analisis relevansi **Jumlah Penduduk Disabilitas** Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional selama periode **2023–2025** menunjukkan adanya perbedaan karakteristik data yang perlu dipahami secara cermat. Data Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara merupakan **jumlah penduduk penyanggah disabilitas usia 4–18 tahun** yang digunakan sebagai dasar indikator **Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penyanggah Disabilitas**, sedangkan data nasional merupakan **jumlah seluruh penyanggah disabilitas** tanpa batasan kelompok umur. Oleh karena itu, perbandingan dilakukan untuk melihat arah perkembangan, bukan membandingkan besaran jumlah secara langsung.

Pada tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, jumlah penyanggah disabilitas usia **4–18 tahun** meningkat dari **190 jiwa pada tahun 2023 dan 2024** menjadi **210 jiwa pada tahun 2025**. Sementara itu, Provinsi Maluku Utara relatif stabil pada kisaran **2.490 jiwa** selama periode yang sama. Di tingkat nasional, jumlah penyanggah disabilitas menurun dari **22,97 juta jiwa pada tahun 2023** menjadi **17,80 juta jiwa pada tahun 2024** dan **15,20 juta jiwa pada tahun 2025**. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh pemutakhiran metode pendataan melalui **Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)** serta penyempurnaan basis data sosial nasional.

3.7.2. Jumlah penduduk lanjut usia terlanter

Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlanter merupakan banyaknya penduduk yang telah memasuki usia lanjut dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, baik karena keterbatasan ekonomi, fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga memerlukan perlindungan, pelayanan, dan bantuan dari pemerintah, keluarga, maupun masyarakat.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih. Sementara itu, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lanjut usia terlanter termasuk dalam kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagaimana diatur dalam kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Catatan Ketersediaan Data Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlanter

Dalam penyusunan analisis karakteristik bidang kesejahteraan sosial, **indikator Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlanter belum dapat dianalisis secara komprehensif**. Hal ini disebabkan **belum tersedianya data resmi yang disajikan secara berkala menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara**, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu. Data yang tersedia pada Portal Satu Data Provinsi Maluku Utara hanya berupa **indikator agregat tingkat provinsi, yaitu Persentase Lanjut Usia Terlanter yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**, dan tidak memuat jumlah lanjut usia terlanter menurut masing-masing kabupaten/kota.

Keterbatasan ketersediaan data tersebut menyebabkan **analisis Posisi Relatif, Perkembangan Antar Waktu, Efektivitas, maupun Relevansi** tidak dapat dilakukan secara objektif dan terukur. Penyusunan analisis pada dokumen perencanaan daerah harus didasarkan pada data yang valid, konsisten, dan dapat dibandingkan antarwilayah maupun antarwaktu. Oleh karena itu, penyajian analisis tanpa dukungan data resmi berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Meskipun demikian, isu lanjut usia terlanter tetap merupakan salah satu permasalahan strategis dalam bidang kesejahteraan sosial. Seiring meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia dan perubahan struktur demografi, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pendataan, pemutakhiran basis data kesejahteraan sosial, serta koordinasi antara **Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPS**, dan instansi terkait agar tersedia data yang lengkap hingga tingkat kabupaten/kota.

Dengan tersedianya data yang lebih komprehensif pada masa mendatang, analisis mengenai kondisi lanjut usia terlanter dapat dilakukan secara lebih akurat sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan lanjut usia, serta program pemberdayaan bagi kelompok lanjut usia yang rentan. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

3.7.3. Jumlah Perempuan rawan sosial ekonomi

Dalam penyusunan analisis karakteristik Bidang Kesejahteraan Sosial, indikator Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) belum dapat dianalisis secara komprehensif. Hal ini disebabkan belum tersedianya data resmi yang dipublikasikan secara terbuka menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu. Penelusuran terhadap publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Portal Satu Data Provinsi Maluku Utara, serta dataset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa indikator PRSE tidak tersedia dalam bentuk jumlah per kabupaten/kota. Dataset yang tersedia lebih banyak memuat indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perempuan, dan indikator pengarusutamaan gender lainnya.

Keterbatasan ketersediaan data tersebut menyebabkan analisis Posisi Relatif, Perkembangan Antar Waktu, Efektivitas, maupun Relevansi tidak dapat dilakukan secara objektif dan berbasis data. Penyusunan analisis dalam dokumen RKPD maupun RPJMD harus menggunakan data yang valid, konsisten, dan dapat dibandingkan antarwilayah maupun antarperiode. Oleh karena itu, penyusunan analisis tanpa dukungan data resmi berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat dan sulit dipertanggungjawabkan.



Meskipun demikian, **perempuan rawan sosial ekonomi** tetap merupakan kelompok sasaran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Kelompok ini umumnya menghadapi kerentanan akibat rendahnya pendapatan, terbatasnya akses terhadap pekerjaan, pendidikan, modal usaha, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pendataan melalui integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta basis data sektoral dari Dinas Sosial dan DP3A agar informasi mengenai perempuan rawan sosial ekonomi dapat tersedia hingga tingkat kabupaten/kota.

Dengan tersedianya data yang lebih lengkap dan terintegrasi pada masa mendatang, analisis terhadap kondisi perempuan rawan sosial ekonomi dapat dilakukan secara lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, serta program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender.

3.7.4. Jumlah anak terlantar

Dalam penyusunan Analisis Karakteristik Masalah Bidang Kesejahteraan Sosial, indikator Jumlah Anak Terlantar belum dapat dianalisis secara komprehensif karena belum tersedia data resmi yang dipublikasikan secara berkala menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Portal Satu Data Provinsi Maluku Utara, serta publikasi sektoral terkait, belum ditemukan data yang dapat digunakan sebagai dasar analisis secara kuantitatif.

Ketiadaan data tersebut menyebabkan analisis Posisi Relatif, Perkembangan Antar Waktu, Efektivitas, maupun Relevansi tidak dapat dilakukan secara objektif dan berbasis bukti. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, setiap analisis harus didukung oleh data yang valid, konsisten, dan dapat dibandingkan antarwilayah maupun antarperiode sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun administratif.

Oleh karena itu, indikator Jumlah Anak Terlantar belum dapat dimanfaatkan sebagai dasar analisis dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Keterbatasan data tersebut menyebabkan pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi secara akurat besaran permasalahan, persebaran wilayah, maupun tren perkembangan anak terlantar sebagai kelompok sasaran program kesejahteraan sosial.

Ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pendataan melalui integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta basis data sektoral dari Dinas Sosial agar tersedia data yang lengkap, mutakhir, dan terstandar hingga tingkat kabupaten/kota. Dengan tersedianya data tersebut, analisis mengenai kondisi anak terlantar dapat dilakukan secara lebih komprehensif sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan keluarga, serta program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

3.7.5. Analisis Masalah Bidang Kesejahteraan Sosial

Analisis bidang sosial dilakukan berdasarkan indikator **Jumlah Penduduk Disabilitas** sebagai salah satu kelompok **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** yang memerlukan perhatian dalam pembangunan daerah. Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang membutuhkan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, serta fasilitas publik yang inklusif. Analisis dilakukan melalui empat aspek, yaitu **Posisi Relatif, Perkembangan Antar Waktu, Efektivitas, dan Relevansi**.

ANALISIS MASALAH BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

INDIKATOR UTAMA : JUMLAH PENDUDUK DISABILITAS

1 POSISI RELATIF

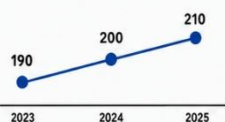
Tahun 2025, jumlah penduduk disabilitas usia 4–18 tahun di Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebanyak **210 jiwa**, lebih rendah dibandingkan total Provinsi Maluku Utara (2.490 jiwa) dan jauh lebih rendah dibandingkan jumlah penyandang disabilitas secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pulau Taliabu relatif kecil, namun tetap memerlukan perhatian karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak kelompok rentan.



2 PERKEMBANGAN ANTAR WAKTU

Selama periode 2023–2025, jumlah penduduk disabilitas meningkat dari **190 jiwa** menjadi **210 jiwa**. Peningkatan tersebut lebih menggambarkan adanya pemutakhiran data dan meningkatnya jangkauan pendataan daripada peningkatan jumlah penyandang disabilitas secara riil.

Jumlah Penduduk Disabilitas Usia 4–18 Tahun di Kabupaten Pulau Taliabu



3 EFEKTIVITAS

Bertambahnya jumlah penyandang disabilitas yang terdata menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai meningkatkan kualitas pendataan dan identifikasi kelompok rentan. Namun, efektivitas pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah data yang tersedia, tetapi juga dari peningkatan akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, kesempatan kerja, bantuan sosial, serta fasilitas publik yang inklusif.



4 RELEVANSI

Dibandingkan Provinsi Maluku Utara dan nasional, data Kabupaten Pulau Taliabu masih terbatas karena hanya mencakup penyandang disabilitas usia 4–18 tahun, sedangkan data nasional mencakup seluruh kelompok umur. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pendataan yang terintegrasi agar data penyandang disabilitas dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan secara lebih akurat.

Kab. Pulau Taliabu (Usia 4–18 Tahun) Provinsi Maluku Utara (Usia 4–18 Tahun) Nasional (Seluruh Kelompok Umur)

KESIMPULAN

Jumlah penduduk disabilitas usia 4–18 tahun di Kabupaten Pulau Taliabu relatif kecil, namun perlu terus menjadi perhatian. Peningkatan jumlah yang terdata lebih mencerminkan perbaikan pendataan. Ke depan, diperlukan peningkatan akses layanan, pemberdayaan, dan fasilitas inklusif, serta penguatan sistem pendataan terintegrasi agar kebijakan kesejahteraan sosial lebih tepat sasaran dan mendukung pengentasan kemiskinan secara nyata.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*; Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara; Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

Permasalahan Utama Bidang Sosial

Berdasarkan hasil analisis di atas, beberapa permasalahan strategis bidang sosial yang berkaitan dengan penyandang disabilitas di Kabupaten Pulau Taliabu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Data penyandang disabilitas belum sepenuhnya komprehensif**, karena data yang tersedia masih didominasi oleh kelompok usia tertentu sehingga belum menggambarkan keseluruhan kondisi penyandang disabilitas di daerah.
- Akses penyandang disabilitas terhadap pelayanan dasar masih perlu ditingkatkan**, terutama pada bidang pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial.
- Kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas masih terbatas**, sehingga sebagian penyandang disabilitas masih bergantung pada bantuan sosial.
- Sarana dan prasarana yang ramah disabilitas masih perlu dikembangkan**, baik pada fasilitas publik, pelayanan pemerintahan, maupun ruang-ruang sosial sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.
- Koordinasi dan integrasi data antarinstansi** masih perlu diperkuat agar pendataan penyandang disabilitas lebih akurat, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.



Kesimpulan

Secara umum, kondisi penyandang disabilitas di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa **tantangan utama bukan terletak pada besarnya jumlah penyandang disabilitas, tetapi pada kualitas pelayanan dan pemberdayaan yang diberikan kepada kelompok tersebut**. Peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang terdata menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pendataan, namun hal tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan sosial, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta aksesibilitas terhadap fasilitas publik.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperkuat **pendataan penyandang disabilitas yang terintegrasi**, memperluas layanan sosial yang inklusif, meningkatkan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, serta membangun lingkungan yang ramah disabilitas. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta mendukung pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang inklusif sesuai prinsip **No One Left Behind**.

3.8. ANALISIS KARAKTERISTIK MASALAH BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

3.8.1. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi layak

Dalam penyusunan analisis karakteristik pada bidang Perumahan dan Permukiman, indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak belum dapat dianalisis secara komprehensif pada tingkat kabupaten/kota. Meskipun indikator ini tersedia pada tingkat Provinsi Maluku Utara dan dipublikasikan secara tahunan, data yang tersedia secara terbuka saat ini belum menyajikan rincian yang dapat digunakan untuk melakukan analisis komparatif antarkabupaten/kota dalam dokumen ini.

Keterbatasan ketersediaan data tersebut menyebabkan analisis Posisi Relatif, Perkembangan Antar Waktu, Efektivitas, dan Relevansi belum dapat dilakukan secara objektif dan berbasis bukti. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, setiap analisis harus didasarkan pada data yang valid, konsisten, serta memiliki cakupan wilayah yang sama agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun administratif.

Oleh karena itu, indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar analisis pengentasan kemiskinan pada tingkat Kabupaten Pulau Taliabu. Keterbatasan data menyebabkan belum dapat diidentifikasi secara rinci kondisi sanitasi layak antarwilayah, tren perkembangannya, maupun efektivitas program sanitasi yang telah dilaksanakan.

Meskipun demikian, akses terhadap sanitasi layak tetap merupakan salah satu indikator penting yang berkaitan erat dengan kualitas kesehatan masyarakat, kualitas permukiman, penurunan stunting, pencegahan penyakit berbasis lingkungan, serta pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem pendataan melalui koordinasi dengan BPS, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, serta pengelola Satu Data Indonesia, sehingga data sanitasi layak dapat tersedia secara lengkap hingga tingkat kabupaten/kota.

Dengan tersedianya data yang lebih rinci pada masa mendatang, analisis mengenai proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas permukiman, serta program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

3.8.2. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Dalam penyusunan analisis karakteristik pada bidang Perumahan dan Permukiman, indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak belum dapat dianalisis secara komprehensif pada tingkat kabupaten/kota. Hal ini disebabkan belum tersedianya data resmi yang dipublikasikan secara terbuka



dan konsisten menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu, yang dapat digunakan sebagai dasar analisis dalam dokumen ini.

Keterbatasan ketersediaan data tersebut menyebabkan analisis Posisi Relatif, Perkembangan Antar Waktu, Efektivitas, dan Relevansi belum dapat dilakukan secara objektif dan berbasis data. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, setiap analisis harus didukung oleh data yang valid, konsisten, dapat dibandingkan antarwilayah, serta memiliki seri waktu yang memadai agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun administratif.

Oleh karena itu, indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak belum dapat dimanfaatkan sebagai dasar analisis dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Keterbatasan data menyebabkan belum dapat dilakukan identifikasi mengenai kondisi akses air minum layak antarwilayah, perkembangan capaian dari tahun ke tahun, maupun efektivitas program penyediaan air minum yang telah dilaksanakan.

Meskipun demikian, akses terhadap air minum layak tetap merupakan salah satu indikator penting yang berkaitan erat dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penurunan angka penyakit berbasis lingkungan, pencegahan stunting, peningkatan kualitas permukiman, serta pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pendataan melalui koordinasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, PDAM, serta pengelola Satu Data Indonesia, sehingga data mengenai akses rumah tangga terhadap air minum layak dapat tersedia secara lengkap, mutakhir, dan terstandar hingga tingkat kabupaten/kota.

Dengan tersedianya data yang lebih rinci dan berkelanjutan pada masa mendatang, analisis mengenai Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur air minum, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

3.8.3. Proporsi rumah tangga dengan akses Listrik

Berdasarkan penelusuran pada publikasi resmi BPS, Portal Satu Data Provinsi Maluku Utara, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, tidak ditemukan data "Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik" yang dipublikasikan menurut kabupaten/kota. Data yang tersedia adalah Jumlah Desa yang Sudah Teraliri Listrik per kabupaten/kota serta rasio elektrifikasi pada tingkat provinsi, tetapi bukan proporsi rumah tangga dengan akses listrik di tingkat kabupaten/kota.

Oleh karena itu, indikator **Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik** belum dapat dianalisis secara komprehensif untuk Kabupaten Pulau Taliabu.

3.8.4. Analisis Masalah Bidang Infrastruktur Dasa

Dalam penyusunan Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar, beberapa indikator utama yang direncanakan untuk dianalisis, seperti Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak, dan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik, belum dapat dianalisis secara komprehensif. Hal ini disebabkan belum tersedianya data resmi yang dipublikasikan secara lengkap, konsisten, dan berkesinambungan menurut kabupaten/kota, khususnya untuk Kabupaten Pulau Taliabu.

Keterbatasan ketersediaan data tersebut menyebabkan analisis Posisi Relatif, Perkembangan Antar Waktu, Efektivitas, dan Relevansi tidak dapat dilakukan secara objektif dan berbasis bukti. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, analisis harus didasarkan pada data yang valid, terstandar, dan dapat dibandingkan antarwilayah maupun antarperiode. Oleh karena itu, penyusunan analisis tanpa dukungan data resmi berpotensi menghasilkan kesimpulan yang kurang akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun administratif.



Dengan belum tersedianya data yang memadai, analisis mengenai Masalah Bidang Infrastruktur Dasar belum dapat disusun secara komprehensif, sehingga indikator-indikator tersebut belum dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kondisi infrastruktur dasar maupun dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Akibatnya, belum dapat dilakukan identifikasi mengenai tingkat kesenjangan pelayanan infrastruktur dasar, efektivitas program pembangunan yang telah dilaksanakan, maupun kebutuhan intervensi pembangunan secara lebih terarah.



BAB IV PRIORITAS PROGRAM

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH





BAB IV. PRIORITAS PROGRAM

4.1. Analisis Prioritas Masalah (Determinan) Kemiskinan dan Teori Perubahan/ToC (Theory of Change)

4.1.1. Prioritas Intervensi Kemiskinan Konsumsi

a. Analisis Prioritas Masalah (Determinan) Kemiskinan Bidang Konsumsi dan Teori Perubahan (Theory of Change/ToC)

Bidang **konsumsi** merupakan salah satu determinan utama kemiskinan karena secara langsung menggambarkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun nonpangan. Dalam konsep pengukuran kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Oleh karena itu, rendahnya tingkat konsumsi bukan hanya mencerminkan keterbatasan daya beli, tetapi juga merupakan akumulasi dari berbagai persoalan struktural seperti rendahnya pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya produktivitas, mahalnya harga kebutuhan pokok, serta keterbatasan akses terhadap pasar.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, kondisi geografis kepulauan menyebabkan biaya distribusi barang menjadi relatif tinggi sehingga harga kebutuhan pokok sering kali lebih mahal dibandingkan wilayah daratan. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat masih menggantungkan penghasilan pada sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan yang sangat dipengaruhi musim, kondisi cuaca, serta fluktuasi harga komoditas. Ketidakstabilan pendapatan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi, pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Rumah tangga miskin pada akhirnya lebih banyak mengalokasikan pengeluarannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok sehingga kualitas konsumsi menjadi rendah dan berpotensi memunculkan masalah gizi, stunting, rendahnya produktivitas tenaga kerja, hingga memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Hasil Analisis Prioritas Masalah (Determinan) Kemiskinan menunjukkan bahwa aspek konsumsi masih menjadi salah satu faktor yang memerlukan perhatian serius pada beberapa kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi harus diikuti dengan upaya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat agar pendapatan rumah tangga meningkat secara berkelanjutan. Dengan demikian, intervensi pada bidang konsumsi harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat sehingga daya beli dapat meningkat secara permanen.

b. Theory of Change (ToC) Bidang Konsumsi

Theory of Change (ToC) pada bidang konsumsi dibangun berdasarkan asumsi bahwa **rendahnya konsumsi masyarakat merupakan akibat langsung dari rendahnya pendapatan, tingginya biaya hidup, serta terbatasnya akses terhadap pangan yang berkualitas dan terjangkau**. Oleh karena itu, perubahan yang diharapkan tidak hanya berupa peningkatan konsumsi, tetapi juga terciptanya ketahanan ekonomi rumah tangga yang mampu menjaga tingkat konsumsi secara berkelanjutan.



Theory of Change (ToC)

Bidang Konsumsi

1. Permasalahan Utama (Problem Statement)

Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih **rendahnya kemampuan rumah tangga miskin** dalam memenuhi kebutuhan konsumsi yang layak akibat **keterbatasan pendapatan**, **tingginya harga kebutuhan pokok**, **terbatasnya diversifikasi sumber pendapatan**, serta belum optimalnya **akses terhadap bahan pangan yang bergizi dan terjangkau**.



Keterbatasan pendapatan



Tingginya harga kebutuhan pokok



Terbatasnya diversifikasi sumber pendapatan



Belum optimalnya akses terhadap bahan pangan bergizi dan terjangkau



Mengatasi masalah konsumsi adalah langkah awal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Pulau Taliabu.



2. Akar Permasalahan (Root Causes)

Analisis menunjukkan bahwa **rendahnya konsumsi** dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1



Pendapatan rumah tangga yang rendah dan tidak stabil.

2



Tingginya ketergantungan pada sektor primer yang bersifat musiman.

3



Tingginya biaya distribusi barang akibat karakteristik wilayah kepulauan.

4



Belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

5



Rendahnya produktivitas usaha mikro dan ekonomi keluarga.

6



Masih terbatasnya akses terhadap pasar dan rantai distribusi.

7



Belum optimalnya pemanfaatan potensi pangan lokal.

8



Ketergantungan terhadap bantuan sosial tanpa penguatan ekonomi produktif.

3. Input

Untuk mengatasi akar permasalahan tersebut diperlukan berbagai sumber daya, antara lain:



Anggaran APBD, APBN, Dana Desa, dan CSR.



Program perlindungan sosial.



Pendamping UMKM dan pemberdayaan masyarakat.



Penyuluh pertanian, perikanan, dan koperasi.



Dukungan OPD terkait.



Kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga keuangan.



Penguatan kelembagaan ekonomi desa.



4. Aktivitas Strategis

Program prioritas diarahkan pada :



1. Pengembangan usaha ekonomi produktif rumah tangga miskin.



2. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.



3. Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal.



4. Pengembangan UMKM dan industri rumah tangga.



5. Pelatihan kewirausahaan.



6. Pengembangan pemasaran digital.



7. Penguatan koperasi dan BUMDes.



8. Bantuan permodalan usaha.



9. Pengembangan kawasan sentra pangan.



10. Penguatan program ketahanan pangan keluarga.



11. Edukasi pola konsumsi bergizi dan seimbang.



5. Output

Hasil langsung yang diharapkan meliputi:

-  Bertambahnya jumlah rumah tangga yang memiliki usaha produktif.
-  Meningkatnya produksi pangan lokal.
-  Meningkatnya jumlah UMKM yang berkembang.
-  Bertambahnya rumah tangga penerima bantuan produktif.
-  Meningkatnya kapasitas pelaku usaha mikro.
-  Terbentuknya jaringan pemasaran produk lokal.
-  Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan bergizi.

6. Outcome Jangka Menengah

Pelaksanaan program secara konsisten diharapkan menghasilkan perubahan berupa:

-  Pendapatan rumah tangga meningkat.
-  Daya beli masyarakat meningkat.
-  Pengeluaran per kapita meningkat di atas garis kemiskinan.
-  Konsumsi pangan menjadi lebih beragam dan bergizi.
-  Penurunan kerawanan pangan rumah tangga.
-  Penurunan jumlah masyarakat miskin ekstrem.
-  Meningkatnya ketahanan ekonomi keluarga.

7. Dampak (Impact)

Dalam jangka panjang, perubahan tersebut diharapkan memberikan dampak berupa:

-  Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan.
-  Menurunnya tingkat kerentanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi.
-  Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
-  Menurunnya prevalensi stunting dan masalah gizi.
-  Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
-  Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

c. Prioritas Program Bidang Konsumsi

Berdasarkan analisis determinan kemiskinan dan Theory of Change tersebut, prioritas program pada bidang konsumsi diarahkan pada:

	Prioritas program bidang konsumsi	
Prioritas Program	Tujuan	
 1. Pengembangan usaha ekonomi produktif keluarga miskin	 Meningkatkan pendapatan rumah tangga	
 2. Penguatan ketahanan pangan berbasis desa	 Menjamin ketersediaan pangan sepanjang tahun	
 3. Diversifikasi pangan lokal	 Mengurangi ketergantungan terhadap pangan dari luar daerah	
 4. Hilirisasi hasil pertanian dan perikanan	 Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani/nelayan	
 5. Pengembangan UMKM pangan	 Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan konsumsi	
 6. Bantuan modal usaha produktif	 Memperkuat ekonomi lokal	
 7. Pengembangan koperasi dan BUMDes	 Menjaga daya beli masyarakat	
 8. Stabilisasi harga kebutuhan pokok	 Menjaga daya beli masyarakat	
 9. Edukasi konsumsi pangan bergizi	 Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga	
 10. Penguatan perlindungan sosial adaptif	 Melindungi kelompok rentan saat terjadi guncangan ekonomi	

d. Kesimpulan

Analisis menunjukkan bahwa permasalahan konsumsi bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya daya beli, tetapi merupakan konsekuensi dari rendahnya produktivitas ekonomi



masyarakat, keterbatasan kesempatan kerja, mahal biaya hidup akibat kondisi kewilayahan kepulauan, serta belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial konsumtif, melainkan harus mengintegrasikan program peningkatan pendapatan, pengembangan ekonomi produktif, hilirisasi komoditas unggulan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan penguatan ketahanan pangan keluarga. Pendekatan tersebut akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan, yaitu meningkatnya daya beli masyarakat, membaiknya kualitas konsumsi rumah tangga, serta menurunnya angka kemiskinan secara bertahap dan berkesinambungan di Kabupaten Pulau Taliabu.

4.1.2. Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan

a. Analisis Prioritas Masalah (Determinan) Kemiskinan Bidang Pendidikan dan Teori Perubahan (Theory of Change/ToC)

Pendidikan merupakan salah satu determinan paling fundamental dalam pembangunan manusia sekaligus instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi (*intergenerational poverty*). Berbagai penelitian pembangunan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, kenaikan pendapatan rumah tangga, perluasan kesempatan kerja, peningkatan inovasi, serta kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, investasi pada sektor pendidikan bukan hanya merupakan investasi sosial, tetapi juga investasi ekonomi jangka panjang yang menghasilkan *human capital* berkualitas.

Dalam perspektif kemiskinan multidimensi, rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu penyebab utama masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Individu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan yang terbatas sehingga hanya mampu bekerja pada sektor informal dengan produktivitas dan pendapatan yang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar menjadi terbatas, termasuk kebutuhan pangan, kesehatan, perumahan, maupun pendidikan generasi berikutnya. Akibatnya, kemiskinan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, pembangunan pendidikan menghadapi tantangan yang relatif kompleks akibat karakteristik wilayah kepulauan, penyebaran penduduk yang berjauhan, keterbatasan infrastruktur transportasi, serta kondisi geografis yang menyebabkan sebagian masyarakat memiliki akses pendidikan yang belum optimal. Sebagian sekolah berada pada wilayah terpencil sehingga memerlukan biaya transportasi yang lebih tinggi serta menghadapi keterbatasan tenaga pendidik dan sarana pembelajaran.

Selain tantangan geografis, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Rumah tangga miskin sering mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti transportasi, perlengkapan sekolah, akses internet, maupun kebutuhan penunjang pembelajaran lainnya. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka putus sekolah, rendahnya partisipasi pendidikan menengah, serta terbatasnya kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan seluruh dimensi pembangunan lainnya. Individu yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki literasi kesehatan yang lebih baik, perilaku hidup sehat yang lebih tinggi, kemampuan mengelola keuangan keluarga yang lebih baik, serta lebih adaptif terhadap inovasi teknologi dan peluang usaha baru. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan akan memberikan dampak yang luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

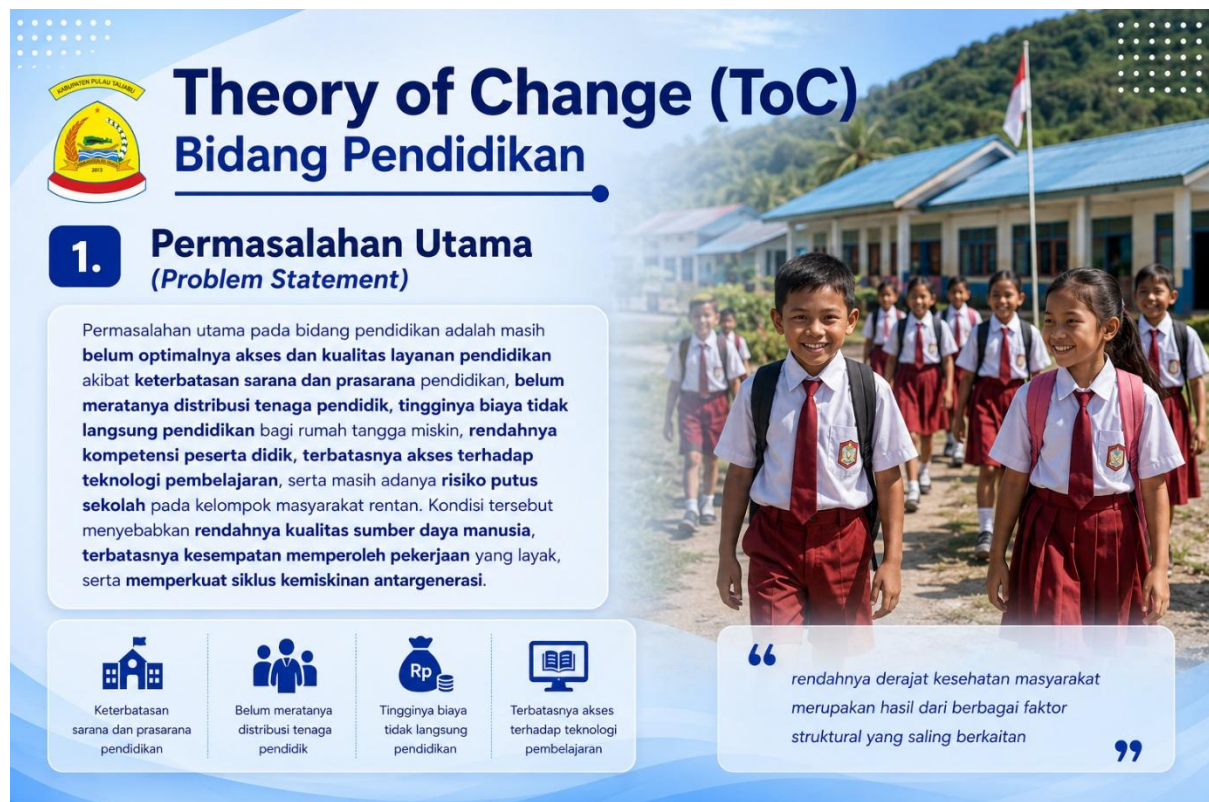
Dalam konteks percepatan penanggulangan kemiskinan, intervensi bidang pendidikan diarahkan tidak hanya pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan tenaga pendidik, penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi digital, serta penguatan

keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, adaptif, dan mampu bersaing dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu investasi pembangunan yang memberikan manfaat paling besar dalam jangka panjang karena mampu meningkatkan kualitas modal manusia (*human capital*), memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi ketimpangan sosial, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

b. Theory of Change (ToC) Bidang Pendidikan

Theory of Change (ToC) pada bidang pendidikan dibangun berdasarkan asumsi bahwa **kemiskinan pendidikan terjadi akibat keterbatasan akses, kualitas layanan pendidikan, kondisi sosial ekonomi rumah tangga, serta rendahnya kompetensi sumber daya manusia**. Melalui penyediaan sumber daya yang memadai dan pelaksanaan berbagai intervensi pendidikan secara terintegrasi, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.



2. Akar Permasalahan (Root Causes)

Analisis menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor berikut.

-  Belum meratanya akses pendidikan akibat kondisi geografis kepulauan.
-  Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
-  Belum meratanya distribusi guru berkualitas.
-  Rendahnya kompetensi tenaga pendidik.
-  Masih adanya peserta didik dari keluarga miskin yang berisiko putus sekolah.
-  Tingginya biaya transportasi menuju sekolah.
-  Rendahnya akses terhadap teknologi informasi dan internet.
-  Terbatasnya pendidikan vokasi dan keterampilan kerja.
-  Rendahnya literasi membaca, numerasi, dan literasi digital.
-  Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan.
-  Keterbatasan sinergi dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri.

3. Input

(Root Causes)

Untuk mengatasi berbagai akar permasalahan tersebut diperlukan berbagai sumber daya, antara lain:

- | | | |
|---|---|---|
|  APBD Kabupaten. |  Guru dan tenaga kependidikan. |  Dukungan Dinas Pendidikan. |
|  APBN. |  Kepala sekolah. |  Kemitraan perguruan tinggi. |
|  Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. |  Pengawas sekolah. |  Dunia usaha dan dunia industri. |
|  Dana BOS. |  Laboratorium dan perpustakaan. |  CSR sektor swasta. |
|  Dana Desa. |  Infrastruktur TIK. |  Organisasi masyarakat. |
|  Beasiswa pemerintah. |  Internet sekolah. |  Komite sekolah. |
|  Sekolah negeri dan swasta. |  Perangkat pembelajaran digital. |  Orang tua peserta didik. |

4. Aktivitas Strategis (Root Causes)

Program prioritas diarahkan pada:

- | | |
|--|--|
|  Pemerataan akses pendidikan berkualitas. |  Pengembangan perpustakaan desa. |
|  Rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah. |  Penyediaan internet sekolah. |
|  Digitalisasi pembelajaran. |  Penguatan kemitraan dengan dunia usaha. |
|  Peningkatan kompetensi guru. |  Pelatihan keterampilan kerja bagi lulusan. |
|  Penguatan pendidikan karakter. |  Pengembangan pendidikan inklusif. |
|  Penguatan literasi dan numerasi. |  Penguatan pendidikan kesetaraan. |
|  Pengembangan pendidikan vokasi. |  Peningkatan pendidikan nonformal. |
|  Penyediaan beasiswa bagi keluarga miskin. |  Pengembangan sekolah ramah anak. |
|  Pencegahan putus sekolah. |  Penguatan pendidikan berbasis potensi lokal. |
|  Penguatan PAUD berkualitas. | |



5. Output (Root Causes)

Pelaksanaan aktivitas tersebut diharapkan menghasilkan:

-  Bertambahnya jumlah sekolah berkualitas.
-  Meningkatnya jumlah guru tersertifikasi.
-  Bertambahnya peserta didik penerima beasiswa.
-  Menurunnya angka putus sekolah.
-  Meningkatnya akses internet sekolah.
-  Bertambahnya perpustakaan aktif.
-  Meningkatnya kompetensi guru.
-  Bertambahnya lulusan pendidikan vokasi.
-  Meningkatnya kegiatan literasi sekolah.
-  Bertambahnya peserta pelatihan keterampilan.



6. Outcome Jangka Menengah (Root Causes)

Dalam jangka menengah diharapkan terjadi perubahan berupa:

-  Meningkatnya rata-rata lama sekolah.
-  Meningkatnya harapan lama sekolah.
-  Meningkatnya kualitas lulusan.
-  Meningkatnya literasi masyarakat.
-  Meningkatnya kompetensi tenaga kerja.
-  Menurunnya angka putus sekolah.
-  Meningkatnya kesempatan kerja.
-  Meningkatnya produktivitas masyarakat.
-  Meningkatnya pendapatan rumah tangga.
-  Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.



c. Prioritas Program Bidang Pendidikan

Prioritas
Program

Bidang Pendidikan (Root Causes)

Prioritas Program	Tujuan
 Pemerataan akses pendidikan	Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas
 Penyediaan beasiswa keluarga miskin	Menurunkan angka putus sekolah
 Rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah	Meningkatkan mutu layanan pendidikan
 Digitalisasi pembelajaran	Memperluas akses pembelajaran berbasis teknologi
 Penguatan kompetensi guru	Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
 Penguatan literasi dan numerasi	Meningkatkan kemampuan dasar peserta didik
 Pengembangan pendidikan vokasi	Meningkatkan kompetensi kerja lulusan
 Pendidikan kesetaraan dan nonformal	Memperluas kesempatan belajar masyarakat
 Penguatan PAUD berkualitas	Meningkatkan kesiapan belajar anak usia dini
 Pengembangan perpustakaan dan budaya literasi	Meningkatkan budaya belajar masyarakat
 Kemitraan pendidikan dengan dunia usaha	Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja





d. Kesimpulan

Analisis Prioritas Masalah menunjukkan bahwa **pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan manusia sekaligus intervensi yang paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan jangka panjang**. Rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas, keterbatasan sarana dan prasarana, ketimpangan distribusi guru, tingginya risiko putus sekolah, serta rendahnya literasi dan kompetensi kerja menyebabkan masyarakat miskin memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh pekerjaan yang produktif dan berpendapatan layak.

Setiap intervensi yang dirancang dalam bidang pendidikan memiliki fungsi yang saling melengkapi. Pemerataan akses pendidikan memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan belajar tanpa terkendala kondisi geografis maupun ekonomi. Penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan berperan menjaga keberlanjutan pendidikan bagi keluarga miskin sehingga mampu menurunkan angka putus sekolah. Rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Digitalisasi pembelajaran membuka akses terhadap sumber belajar yang lebih luas, sekaligus mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah. Penguatan kompetensi guru meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Sementara itu, penguatan literasi, numerasi, dan budaya membaca menjadi fondasi bagi peningkatan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi masyarakat.

Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan kerja memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Hal ini memungkinkan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja serta meningkatkan peluang berwirausaha. Pendidikan nonformal dan pendidikan kesetaraan memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat yang sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal, sehingga memperluas akses terhadap pekerjaan dan peningkatan pendapatan.

Penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan investasi yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sejak dini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa investasi pendidikan usia dini memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang jauh lebih besar dibandingkan intervensi pada usia yang lebih tinggi, karena berkontribusi terhadap perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan karakter anak.

Keseluruhan rangkaian intervensi tersebut membentuk **Theory of Change** yang sistematis, dimulai dari penyediaan sumber daya (input), pelaksanaan program strategis (activities), tercapainya keluaran (output), perubahan perilaku dan peningkatan kualitas pendidikan (outcome), hingga terciptanya dampak jangka panjang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja yang lebih luas, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan harus dipandang sebagai investasi pembangunan yang menghasilkan manfaat lintas generasi, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung terwujudnya Kabupaten Pulau Taliabu yang maju, inklusif, dan sejahtera.

4.1.2. Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan

a. Analisis Prioritas Masalah (Determinan) Kemiskinan Bidang Kesehatan dan Teori Perubahan (Theory of Change/ToC)

Kesehatan merupakan salah satu determinan utama dalam pembangunan manusia sekaligus fondasi bagi peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kesehatan bukan hanya dipandang sebagai hasil (outcome) pembangunan, tetapi juga sebagai modal dasar (human capital) yang menentukan kemampuan individu dalam berpartisipasi secara optimal pada aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan derajat kesehatan



masyarakat menjadi salah satu strategi paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan yang bersifat struktural maupun antargenerasi.

Kemiskinan dan kesehatan memiliki hubungan yang bersifat dua arah (*bidirectional relationship*). Masyarakat miskin umumnya memiliki keterbatasan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, mengonsumsi pangan bergizi, memperoleh akses sanitasi yang layak, serta menikmati lingkungan hidup yang sehat. Sebaliknya, kondisi kesehatan yang buruk menyebabkan produktivitas tenaga kerja menurun, meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk biaya pengobatan, mengurangi kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, serta memperbesar risiko rumah tangga jatuh kembali ke dalam kemiskinan (*poverty trap*). Dengan demikian, intervensi kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penanggulangan kemiskinan.

Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan menghadapi tantangan kesehatan yang memiliki karakteristik khusus. Kondisi geografis berupa sebaran pulau-pulau kecil, jarak antarpermukiman yang relatif jauh, keterbatasan sarana transportasi laut maupun darat, serta kondisi cuaca yang memengaruhi mobilitas masyarakat menyebabkan akses terhadap pelayanan kesehatan belum sepenuhnya merata. Beberapa desa masih membutuhkan waktu tempuh yang cukup panjang menuju fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan sehingga pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan pasien gawat darurat, belum dapat diperoleh secara optimal.

Selain faktor geografis, hasil analisis determinan kemiskinan menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), masih adanya permasalahan gizi terutama stunting dan anemia pada ibu hamil, keterbatasan akses terhadap sanitasi layak dan air minum aman, belum meratanya tenaga kesehatan, serta belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan primer. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi sehingga membentuk suatu lingkaran yang memperkuat kemiskinan.

Investasi pada sektor kesehatan memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar. Masyarakat yang sehat memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi, tingkat absensi yang lebih rendah, kemampuan belajar yang lebih baik, serta peluang memperoleh pendapatan yang lebih besar. Sebaliknya, beban penyakit kronis maupun penyakit menular akan meningkatkan biaya kesehatan rumah tangga sehingga mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, konsumsi pangan bergizi, dan investasi usaha produktif.

Oleh karena itu, prioritas intervensi bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer, mempercepat penurunan stunting, memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak, memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan kualitas sanitasi dan air minum layak, memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan. Seluruh intervensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat modal manusia, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan pada akhirnya mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

b. Theory of Change (ToC) Bidang Kesehatan

Theory of Change (ToC) Bidang Kesehatan dibangun berdasarkan asumsi bahwa **rendahnya derajat kesehatan masyarakat merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor struktural, sosial, ekonomi, geografis, dan perilaku yang saling memengaruhi**. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kesehatan tidak dapat dicapai hanya melalui pembangunan fasilitas kesehatan, tetapi harus dilakukan secara terpadu melalui penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas lingkungan, perubahan perilaku masyarakat, serta penguatan perlindungan sosial.



Theory of Change (ToC)

Bidang Kesehatan

1. Permasalahan Utama

(Problem Statement)

Permasalahan utama pada bidang kesehatan adalah masih belum optimalnya **derajat kesehatan masyarakat** akibat **belum meratanya akses** terhadap **elayanan kesehatan yang berkualitas**, tingginya **kerentanan kelompok miskin** terhadap penyakit, masih adanya permasalahan gizi terutama **stunting** dan **anemia**, terbatasnya akses terhadap **sanitasi layak** dan **air minum aman**, serta rendahnya **perilaku hidup bersih dan sehat**. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya **beban pengeluaran rumah tangga** untuk biaya kesehatan, **menurunnya produktivitas** tenaga kerja, **rendahnya kualitas sumber daya manusia**, dan pada akhirnya **memperkuat siklus kemiskinan**.



Meningkatnya beban pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan



Menurunnya produktivitas tenaga kerja

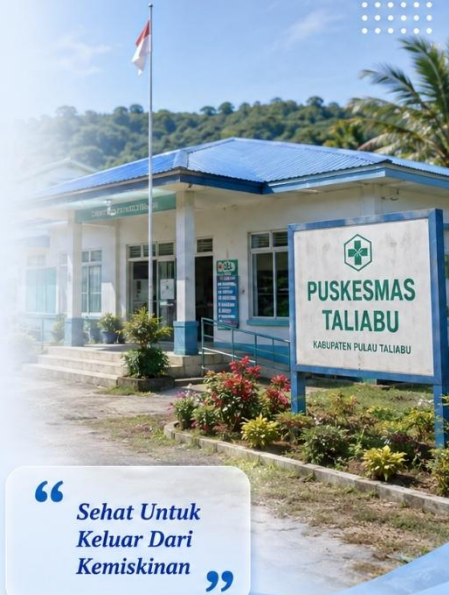


Rendahnya kualitas sumber daya manusia



Memperkuat siklus kemiskinan

“
Sehat Untuk
Keluar Dari
Kemiskinan
”



2. Akar Permasalahan (Root Causes)

(Root Causes)

Berdasarkan hasil analisis determinan kemiskinan, akar permasalahan bidang kesehatan meliputi:



Belum meratanya akses pelayanan kesehatan akibat karakteristik wilayah kepulauan.



Keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan.



Kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai.



Rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan preventif.



Masih tingginya prevalensi stunting, anemia, dan kekurangan gizi.



Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak.



Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat.



Terbatasnya akses terhadap sanitasi layak dan air minum aman.



Tingginya biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan.



Belum optimalnya sistem rujukan kesehatan.



Rendahnya literasi kesehatan masyarakat.



Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan.



Keterbatasan integrasi pelayanan kesehatan dengan program perlindungan sosial.



3. Input (Root Causes)

Untuk mengatasi berbagai akar permasalahan tersebut diperlukan dukungan sumber daya berupa:

-  Anggaran APBD, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, dan pembiayaan JKN.
-  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, Pustu, Poskesdes, dan Posyandu.
-  Dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, tenaga gizi, sanitarian, tenaga farmasi, tenaga promosi kesehatan, dan tenaga kesehatan lingkungan.
-  Ambulans darat dan laut.
-  Sistem Informasi Kesehatan Daerah.
-  Dukungan Dinas Kesehatan dan OPD terkait.
-  Kader Posyandu, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
-  Kemitraan dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, sektor swasta, dan CSR.
-  Teknologi informasi dan *telemedicine*.
-  Dukungan regulasi dan kebijakan daerah.



4. Aktivitas Strategis (Root Causes)

Program prioritas diarahkan pada:

-  Penguatan pelayanan kesehatan primer.
-  Peningkatan mutu Puskesmas dan jaringan pelayanan kesehatan.
-  Penguatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan remaja.
-  Percepatan penurunan stunting dan anemia.
-  Penguatan pelayanan gizi masyarakat.
-  Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap.
-  Penyediaan tenaga kesehatan pada wilayah terpencil.
-  Peningkatan kapasitas SDM kesehatan.
-  Penguatan Posyandu aktif.
-  Edukasi PHBS dan GERMAS.
-  Penguatan sanitasi berbasis masyarakat.
-  Peningkatan akses air minum aman.
-  Penguatan surveilans penyakit.
-  Pengembangan *telemedicine*.
-  Penguatan sistem rujukan kesehatan.
-  Integrasi pelayanan kesehatan dengan program perlindungan sosial.



5. Output (Root Causes)

Pelaksanaan aktivitas strategis tersebut diharapkan menghasilkan:

-  Bertambahnya masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas.
-  Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
-  Bertambahnya Posyandu aktif.
-  Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan.
-  Meningkatnya cakupan imunisasi.
-  Meningkatnya rumah tangga yang menerapkan PHBS.
-  Bertambahnya desa dengan akses sanitasi layak.
-  Bertambahnya masyarakat yang memperoleh akses air minum aman.
-  Meningkatnya kepesertaan JKN.
-  Meningkatnya pelayanan kesehatan berbasis digital.



6. Outcome Jangka Menengah (Root Causes)

Perubahan yang diharapkan meliputi:

-  Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
-  Menurunnya prevalensi stunting dan anemia.
-  Menurunnya angka kesakitan dan kematian.
-  Meningkatnya angka harapan hidup.
-  Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
-  Berkurangnya pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan.
-  Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
-  Meningkatnya ketahanan kesehatan keluarga.



7. Dampak (Impact)

(Root Causes)

Dalam jangka panjang, perubahan tersebut diharapkan menghasilkan:

-  Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan.
-  Terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
-  Meningkatkan kualitas modal manusia (human capital).
-  Menurunnya ketimpangan akses pelayanan kesehatan.
-  Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.
-  Terwujudnya pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.



c. Prioritas Program Bidang Kesehatan

Prioritas Program Bidang Kesehatan

(Root Causes)

Prioritas Program	Tujuan
 Penguatan pelayanan kesehatan primer	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas
 Percepatan penurunan stunting	Meningkatkan status gizi ibu dan anak serta mencegah kehilangan potensi sumber daya manusia
 Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kesehatan reproduksi
 Penguatan Posyandu dan kader kesehatan	Memperluas pelayanan promotif dan preventif berbasis masyarakat
 Penyediaan tenaga kesehatan daerah terpencil	Mengurangi kesenjangan pelayanan antarwilayah
 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
 Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional	Mengurangi beban biaya kesehatan rumah tangga miskin
 Pengembangan telemedicine	Memperluas akses pelayanan kesehatan pada wilayah kepulauan
 Program PHBS dan GERMAS	Meningkatkan perilaku hidup sehat dan mencegah penyakit
 Peningkatan akses sanitasi dan air minum aman	Mengurangi penyakit berbasis lingkungan
 Penguatan surveilans penyakit	Meningkatkan ketahanan sistem kesehatan terhadap wabah dan bencana



d. Kesimpulan

Hasil Analisis Prioritas Masalah menunjukkan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu determinan yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Kondisi kesehatan masyarakat yang belum optimal tidak hanya meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, tetapi juga mengurangi produktivitas tenaga kerja, mempersempit peluang memperoleh pendapatan yang layak, serta menghambat peningkatan kualitas



sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan harus diposisikan sebagai investasi strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial daerah.

Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fondasi utama dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, terutama pada wilayah kepulauan dan desa terpencil. Pelayanan kesehatan primer yang kuat akan mampu mendeteksi penyakit secara dini, memberikan pelayanan promotif dan preventif secara berkelanjutan, serta mengurangi kebutuhan pelayanan rujukan yang memerlukan biaya lebih besar.

Percepatan penurunan stunting dan peningkatan status gizi masyarakat merupakan intervensi yang sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap pembentukan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Anak yang tumbuh sehat memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi ketika dewasa, serta peluang yang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, stunting berpotensi menurunkan kemampuan kognitif, produktivitas kerja, dan pendapatan sepanjang siklus kehidupan.

Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan investasi jangka panjang yang mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, serta memastikan setiap anak memperoleh awal kehidupan yang sehat. Intervensi ini harus diintegrasikan dengan pelayanan gizi, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, dan edukasi keluarga agar memberikan dampak yang optimal.

Pemberdayaan Posyandu, kader kesehatan, PKK, dan masyarakat menjadi strategi penting dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hingga tingkat desa. Pendekatan berbasis masyarakat memungkinkan upaya promotif dan preventif dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kesehatan.

Penyediaan tenaga kesehatan yang merata, peningkatan kompetensi SDM kesehatan, serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan. Pada wilayah kepulauan seperti Kabupaten Pulau Taliabu, pengembangan telemedicine dan sistem pelayanan kesehatan digital juga menjadi solusi inovatif untuk mengatasi hambatan geografis, mempercepat konsultasi medis, dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan perlindungan sosial kesehatan berperan dalam mengurangi risiko pengeluaran kesehatan yang bersifat katastrofik (*catastrophic health expenditure*), sehingga rumah tangga miskin tidak semakin terpuruk akibat biaya pengobatan. Di sisi lain, peningkatan akses sanitasi layak, air minum aman, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan langkah preventif yang mampu menurunkan insiden penyakit berbasis lingkungan secara signifikan.

Secara keseluruhan, Theory of Change Bidang Kesehatan menggambarkan bahwa penyediaan sumber daya (input), pelaksanaan aktivitas strategis (activities), pencapaian keluaran (output), dan perubahan kondisi masyarakat (outcome) akan bermuara pada terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Keberhasilan intervensi kesehatan tidak hanya diukur dari meningkatnya indikator kesehatan, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan produktivitas ekonomi, mengurangi kerentanan sosial, memperkuat kualitas modal manusia, dan mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara terpadu, lintas sektor, berbasis bukti, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.



4.1.3. Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan

a. Analisis Prioritas Masalah (Determinan) Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan dan Teori Perubahan (Theory of Change/ToC)

Ketenagakerjaan merupakan salah satu determinan utama kemiskinan yang memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pekerjaan yang produktif (*productive employment*) dan layak (*decent work*) merupakan instrumen utama dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga, mengurangi ketimpangan pendapatan, memperkuat daya beli masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja menjadi salah satu strategi fundamental dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Menurut konsep *decent work* yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO), pekerjaan yang layak tidak hanya diukur dari tersedianya lapangan kerja, tetapi juga dari tingkat produktivitas, kepastian pendapatan, perlindungan sosial, keselamatan kerja, kesempatan pengembangan kompetensi, serta kesetaraan kesempatan bagi seluruh kelompok masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan sehingga mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki karakteristik ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer, terutama pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Struktur ekonomi tersebut menyebabkan sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor informal dengan tingkat produktivitas relatif rendah, pendapatan yang tidak stabil, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi musim maupun fluktuasi harga komoditas. Selain itu, keterbatasan sektor industri pengolahan menyebabkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan masih relatif rendah sehingga peluang kerja formal juga masih terbatas.

Hasil Analisis Determinan Kemiskinan menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan rumah tangga di Kabupaten Pulau Taliabu sangat dipengaruhi oleh terbatasnya kesempatan kerja produktif, rendahnya keterampilan tenaga kerja, belum optimalnya hubungan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, terbatasnya investasi sektor riil, serta belum berkembangnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Di sisi lain, perkembangan teknologi, transformasi digital, dan perubahan struktur ekonomi nasional menuntut tersedianya sumber daya manusia yang adaptif, memiliki keterampilan teknis (*hard skills*) maupun keterampilan nonteknis (*soft skills*). Apabila peningkatan kompetensi tenaga kerja tidak dilakukan secara sistematis, maka masyarakat lokal akan semakin sulit bersaing dalam memperoleh kesempatan kerja yang layak.

Karakteristik wilayah kepulauan juga menyebabkan biaya logistik relatif tinggi sehingga investasi sektor industri berkembang lebih lambat dibandingkan wilayah lain. Akibatnya, sebagian besar masyarakat masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor tradisional yang rentan terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan fluktuasi harga pasar.

Dalam konteks tersebut, pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja baru, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan kewirausahaan, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, penguatan UMKM, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan investasi daerah. Intervensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja formal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

b. Theory of Change (ToC) Bidang Ketenagakerjaan

Theory of Change (ToC) Bidang Ketenagakerjaan dibangun berdasarkan asumsi bahwa **kemiskinan terjadi karena masyarakat belum memperoleh pekerjaan yang produktif, pendapatan yang layak, dan kesempatan mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja**. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diiringi dengan penciptaan kesempatan kerja baru, penguatan kewirausahaan, dan pengembangan ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.

Theory of Change (ToC) Bidang Ketenagakerjaan

1. Permasalahan Utama (Problem Statement)

Permasalahan utama bidang ketenagakerjaan adalah masih terbatasnya **kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan** akibat **rendahnya kompetensi tenaga kerja**, **terbatasnya investasi dan sektor industri**, dominannya **pekerjaan informal berproduktivitas rendah**, belum optimalnya pengembangan **kewirausahaan dan UMKM**, serta belum kuatnya keterkaitan antara dunia pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan dunia usaha. Kondisi tersebut menyebabkan **rendahnya pendapatan rumah tangga**, meningkatnya kerentanan ekonomi, dan memperkuat **siklus kemiskinan**.



Kompetensi
Tenaga Kerja Rendah



Kesempatan Kerja
Terbatas



UMKM Belum
Optimal



Dominasi
Pekerjaan Informal




“ Investasi
Membuka Peluang Kerja ”

2. Akar Permasalahan (Root Causes)

Hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya kualitas ketenagakerjaan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.
2. Belum optimalnya pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi.
3. Terbatasnya kesempatan kerja formal.
4. Dominasi pekerjaan sektor informal dengan produktivitas rendah.
5. Terbatasnya investasi pada sektor produktif.
6. Belum berkembangnya industri pengolahan berbasis potensi lokal.
7. Rendahnya kapasitas kewirausahaan masyarakat.
8. Keterbatasan akses permodalan bagi UMKM dan usaha rintisan.
9. Belum optimalnya sistem informasi pasar kerja.
10. Lemahnya keterkaitan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.
11. Tingginya biaya logistik akibat karakteristik wilayah kepulauan.
12. Rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi.
13. Terbatasnya kesempatan kerja bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.



3. Input (Root Causes)

Untuk mengatasi berbagai akar permasalahan tersebut diperlukan dukungan sumber daya berupa:

- | | |
|---|---|
|  1. APBD Kabupaten. |  11. Dunia usaha dan dunia industri. |
|  2. APBN. |  12. Program CSR. |
|  3. Dana Alokasi Khusus (DAK). |  13. Lembaga keuangan dan perbankan. |
|  4. Dana Desa. |  14. Inkubator bisnis. |
|  5. Balai Latihan Kerja (BLK). |  15. Pendamping UMKM. |
|  6. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). |  16. Teknologi digital. |
|  7. Dinas Tenaga Kerja. |  17. Sistem informasi pasar kerja. |
|  8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. |  18. Sertifikasi kompetensi. |
|  9. Dinas Koperasi dan UMKM. |  19. Kemitraan investasi. |
|  10. Perguruan tinggi. | |

4. Aktivitas Strategis (Root Causes)

Program prioritas diarahkan pada:

- | | |
|---|---|
|  1. Penguatan pendidikan vokasi. |  10. Pengembangan pemasaran digital. |
|  2. Sertifikasi kompetensi tenaga kerja. |  11. Penguatan koperasi. |
|  3. Pengembangan Balai Latihan Kerja. |  12. Penyelenggaraan bursa kerja. |
|  4. Pengembangan kewirausahaan muda. |  13. Penguatan sistem informasi pasar kerja. |
|  5. Penguatan UMKM produktif. |  14. Peningkatan investasi daerah. |
|  6. Pengembangan ekonomi kreatif. |  15. Pengembangan ekonomi desa. |
|  7. Hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. |  16. Pemberdayaan perempuan dan pemuda. |
|  8. Pengembangan kawasan industri kecil. |  17. Pemberdayaan penyandang disabilitas. |
|  9. Fasilitasi akses permodalan usaha. |  18. Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. |

5. Output (Root Causes)

Pelaksanaan aktivitas strategis tersebut diharapkan menghasilkan:

-  Bertambahnya tenaga kerja tersertifikasi.
-  Bertambahnya peserta pelatihan kerja.
-  Bertambahnya UMKM produktif.
-  Meningkatnya jumlah wirausaha baru.
-  Bertambahnya koperasi aktif.
-  Bertambahnya investasi sektor produktif.
-  Bertambahnya kesempatan kerja baru.
-  Bertambahnya industri pengolahan lokal.
-  Meningkatnya akses pembiayaan usaha.
-  Meningkatnya penggunaan teknologi digital oleh pelaku usaha.



6. Outcome Jangka Menengah (Root Causes)

Perubahan yang diharapkan meliputi:

-  Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
-  Meningkatnya kesempatan kerja formal.
-  Meningkatnya pendapatan rumah tangga.
-  Menurunnya tingkat pengangguran terbuka.
-  Menurunnya tingkat pekerja informal berpendapatan rendah.
-  Meningkatnya daya saing tenaga kerja lokal.
-  Meningkatnya pertumbuhan UMKM.
-  Meningkatnya investasi daerah.
-  Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
-  Menurunnya angka kemiskinan.



7. Dampak (Impact) (Root Causes)

Dalam jangka panjang, perubahan tersebut diharapkan menghasilkan:

-  Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan.
-  Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing.
-  Meningkatnya kualitas modal manusia (*human capital*).
-  Terbentuknya struktur ekonomi daerah yang lebih produktif dan inklusif.
-  Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
-  Menurunnya ketimpangan pendapatan.
-  Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
-  Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.



c. Prioritas Program Bidang Ketenagakerjaan

Prioritas Program Bidang Ketenagakerjaan (Root Causes)

Prioritas Program	Tujuan
1.  Pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
2.  Penguatan pendidikan vokasi	Menyesuaikan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja
3.  Sertifikasi kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan pengakuan kompetensi dan peluang kerja
4.  Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK)	Memperluas akses pelatihan berkualitas
5.  Pengembangan kewirausahaan muda	Menciptakan wirausaha baru dan lapangan kerja
6.  Penguatan UMKM produktif	Meningkatkan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja
7.  Hilirisasi komoditas unggulan	Meningkatkan nilai tambah dan kesempatan kerja lokal
8.  Penguatan koperasi dan ekonomi desa	Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis komunitas
9.  Fasilitasi akses permodalan	Mempercepat pertumbuhan usaha produktif
10.  Pengembangan pemasaran digital	Memperluas akses pasar dan meningkatkan pendapatan
11.  Penguatan investasi daerah	Mendorong penciptaan lapangan kerja baru
12.  Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Mewujudkan kesempatan kerja yang inklusif





d. Kesimpulan

Hasil Analisis Prioritas Masalah menunjukkan bahwa **ketenagakerjaan merupakan determinan yang paling langsung memengaruhi tingkat kemiskinan rumah tangga karena berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan yang layak dan berkelanjutan**. Rendahnya kualitas tenaga kerja, terbatasnya kesempatan kerja formal, dominasi sektor informal dengan produktivitas rendah, serta belum berkembangnya sektor ekonomi produktif menyebabkan sebagian masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi kerentanan ekonomi yang tinggi.

Penguatan pelatihan kerja berbasis kompetensi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi akan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal sehingga mampu memperoleh pekerjaan yang lebih produktif dengan pendapatan yang lebih baik. Pada saat yang sama, pengembangan Balai Latihan Kerja dan sistem pelatihan berbasis potensi daerah akan memastikan bahwa kompetensi yang dibangun sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal.

Pengembangan kewirausahaan muda dan penguatan UMKM merupakan strategi penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Pulau Taliabu, pengembangan usaha mikro berbasis potensi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif akan memberikan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Hilirisasi komoditas unggulan menjadi intervensi yang sangat penting karena mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperpanjang rantai produksi di dalam daerah, serta menciptakan lapangan kerja baru pada sektor pengolahan, pemasaran, dan logistik. Penguatan koperasi dan ekonomi desa juga akan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan efisiensi produksi, akses pembiayaan, dan daya saing usaha kecil.

Fasilitasi akses permodalan melalui lembaga keuangan, program pemerintah, dan kemitraan dengan sektor swasta menjadi prasyarat penting agar pelaku usaha dapat memperluas skala usahanya. Pengembangan pemasaran digital akan membuka akses terhadap pasar yang lebih luas sehingga produk lokal memiliki peluang bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Peningkatan investasi daerah merupakan faktor pengungkit utama dalam menciptakan lapangan kerja formal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung, kepastian hukum, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha.

Seluruh rangkaian intervensi tersebut membentuk suatu **Theory of Change** yang menunjukkan bahwa penyediaan sumber daya (input), pelaksanaan program strategis (activities), pencapaian keluaran (output), dan perubahan kondisi ketenagakerjaan (outcome) akan menghasilkan dampak jangka panjang berupa meningkatnya produktivitas tenaga kerja, bertambahnya kesempatan kerja yang layak, meningkatnya pendapatan rumah tangga, tumbuhnya ekonomi lokal yang inklusif, serta menurunnya angka kemiskinan secara berkelanjutan. Keberhasilan intervensi ketenagakerjaan tidak hanya diukur dari jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi juga dari peningkatan kualitas pekerjaan, produktivitas, pendapatan, dan ketahanan ekonomi keluarga. Dengan demikian, pembangunan ketenagakerjaan harus menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu.



4.1.4. Prioritas Intervensi Bidang Kesenjangan Gender

a. Analisis Prioritas Masalah (Determinan) Kemiskinan Bidang Kesenjangan Gender dan Teori Perubahan (Theory of Change/ToC)

Kesenjangan gender merupakan salah satu determinan penting dalam pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan inklusif, kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga oleh ketidaksetaraan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki. Ketika salah satu kelompok mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, akses terhadap sumber daya ekonomi, maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan, maka potensi pembangunan daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender menjadi strategi penting dalam memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.

Kemiskinan memiliki dimensi gender yang sangat kuat. Berbagai studi menunjukkan bahwa perempuan, terutama perempuan kepala keluarga, perempuan penyandang disabilitas, perempuan di wilayah terpencil, dan perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, memiliki risiko lebih besar mengalami kemiskinan dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan formal, rendahnya kepemilikan aset produktif, tingginya beban kerja domestik, keterbatasan akses terhadap pembiayaan, serta masih adanya norma sosial yang membatasi partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu, karakteristik wilayah kepulauan serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer menyebabkan perempuan banyak terlibat pada pekerjaan keluarga yang tidak dibayar (*unpaid family workers*) maupun usaha berskala mikro dengan produktivitas relatif rendah. Di sisi lain, kontribusi perempuan dalam sektor pertanian, perikanan, perdagangan, serta usaha rumah tangga sebenarnya sangat besar, namun belum sepenuhnya diikuti dengan akses yang setara terhadap pelatihan, teknologi, pembiayaan, maupun pasar.

Selain aspek ekonomi, ketimpangan gender juga memengaruhi akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Anak perempuan dari keluarga miskin yang mengalami putus sekolah, menikah pada usia dini, atau memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi berpotensi menghadapi risiko kemiskinan yang lebih tinggi ketika memasuki usia produktif.

Kesenjangan gender tidak berarti menyeragamkan peran perempuan dan laki-laki, melainkan memastikan bahwa keduanya memiliki kesempatan, hak, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam seluruh proses pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan 5**, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Dalam konteks percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu, intervensi bidang kesetaraan gender diarahkan pada peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan kapasitas perempuan pelaku UMKM, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, penguatan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan, serta penguatan kelembagaan yang responsif gender. Seluruh intervensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga, memperkuat ketahanan rumah tangga, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan secara inklusif.

b. Theory of Change (ToC) Bidang Kesetaraan Gender

Theory of Change (ToC) Bidang Kesetaraan Gender dibangun berdasarkan asumsi bahwa **ketimpangan gender merupakan salah satu faktor struktural yang membatasi akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengambilan keputusan**, sehingga memperbesar risiko kemiskinan. Apabila hambatan-hambatan tersebut dihilangkan melalui kebijakan yang responsif gender, maka perempuan dan laki-laki akan memiliki kesempatan yang lebih setara dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan daerah.

Theory of Change (ToC) Bidang Kesetaraan Gender

1. Permasalahan Utama (Problem Statement)

Permasalahan utama pada bidang kesetaraan gender adalah masih belum optimalnya **kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki** dalam memperoleh akses terhadap **pendidikan, pekerjaan, sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial**, serta **pengambilan keputusan**. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya **pemberdayaan ekonomi perempuan**, tingginya **kerentanan kelompok rentan terhadap kemiskinan**, belum optimalnya **kontribusi perempuan dalam pembangunan**, serta meningkatnya risiko **kemiskinan antargenerasi**.



Akses Belum Setara



Pemberdayaan
Ekonomi Perempuan Rendah



Partisipasi Pengambilan
Keputusan Terbatas



Kelompok Rentan
Berisiko Miskin

“ Kesetaraan Gender
untuk Kesejahteraan ”

2. Akar Permasalahan (Root Causes)

Analisis menunjukkan bahwa ketimpangan gender dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- Masih adanya norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan.
- Rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan teknologi.
- Terbatasnya akses perempuan terhadap lapangan pekerjaan formal.
- Rendahnya akses perempuan terhadap pembiayaan dan aset produktif.
- Tingginya beban kerja domestik dan kerja pengasuhan yang tidak dibayar.
- Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender.
- Rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan.
- Belum optimalnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan.
- Terbatasnya data terpilah menurut jenis kelamin untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.
- Rendahnya kapasitas kelembagaan dalam pembangunan responsif gender.
- Masih terbatasnya akses perempuan penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik dan kesempatan ekonomi.

3. Input (Root Causes)

Untuk mengatasi berbagai akar permasalahan tersebut diperlukan dukungan sumber daya berupa:

- | | |
|---|--|
| 1. APBD Kabupaten. | 11. Dunia usaha dan CSR. |
| 2. APBN. | 12. Lembaga keuangan. |
| 3. Dana Desa. | 13. Lembaga pelatihan kerja. |
| 4. Program Pengarusutamaan Gender (PUG). | 14. Pendamping UMKM. |
| 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. | 15. Sistem data terpadu gender. |
| 6. OPD terkait. | 16. Regulasi daerah responsif gender. |
| 7. Organisasi perempuan. | 17. Forum Anak dan Forum Perempuan. |
| 8. PKK. | 18. Organisasi penyandang disabilitas. |
| 9. Kelompok usaha perempuan. | 19. Tokoh agama dan tokoh masyarakat. |
| 10. Perguruan tinggi. | |



4. Aktivitas Strategis (Root Causes)

Program prioritas diarahkan pada:

- | | |
|---|--|
| 1. Penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan. | 10. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi. |
| 2. Pengembangan kewirausahaan perempuan. | 11. Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG). |
| 3. Pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal. | 12. Penyusunan anggaran responsif gender. |
| 4. Penguatan UMKM perempuan. | 13. Penguatan data terpadu gender. |
| 5. Fasilitasi akses pembiayaan bagi perempuan. | 14. Peningkatan kepemimpinan perempuan. |
| 6. Pengembangan koperasi perempuan. | 15. Pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas. |
| 7. Penguatan perlindungan perempuan dan anak. | 16. Edukasi kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat. |
| 8. Pencegahan perkawinan anak. | 17. Penguatan jejaring perlindungan sosial perempuan. |
| 9. Peningkatan akses pendidikan perempuan. | |



5. Output (Root Causes)

Pelaksanaan aktivitas strategis tersebut diharapkan menghasilkan:

-  Bertambahnya perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan.
-  Bertambahnya UMKM yang dikelola perempuan.
-  Meningkatnya akses perempuan terhadap pembiayaan usaha.
-  Bertambahnya perempuan yang memperoleh pekerjaan produktif.
-  Bertambahnya desa yang menerapkan Pengarusutamaan Gender.
-  Meningkatnya jumlah kebijakan responsif gender.
-  Bertambahnya perempuan yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
-  Meningkatnya layanan perlindungan perempuan dan anak.
-  Bertambahnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin.



6. Outcome Jangka Menengah (Root Causes)

Perubahan yang diharapkan meliputi:

-  Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan.
-  Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
-  Meningkatnya pendapatan rumah tangga.
-  Menurunnya kesenjangan gender dalam kesempatan kerja.
-  Meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan.
-  Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak.
-  Meningkatnya ketahanan ekonomi keluarga.
-  Menurunnya kerentanan perempuan terhadap kemiskinan.



7. Dampak (Impact) (Root Causes)

Dalam jangka panjang, perubahan tersebut diharapkan menghasilkan:



Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan.



Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.



Meningkatnya kesejahteraan keluarga.



Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.



Menurunnya ketimpangan sosial dan ekonomi.



Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah.



Terwujudnya masyarakat yang setara, mandiri, dan berdaya saing.



c. Prioritas Program Bidang Kesetaraan Gender

Prioritas Program

Bidang Kesetaraan Gender

(Root Causes)

Prioritas Program	Tujuan
Pemberdayaan ekonomi perempuan	Meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi perempuan
Penguatan UMKM perempuan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha perempuan
Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan	Meningkatkan kompetensi perempuan sesuai kebutuhan pasar
Fasilitasi akses pembiayaan	Memperluas akses perempuan terhadap modal usaha
Pengembangan koperasi perempuan	Memperkuat kelembagaan ekonomi perempuan
Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Mewujudkan pembangunan yang responsif gender
Penyusunan anggaran responsif gender	Meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan
Perlindungan perempuan dan anak	Mengurangi kerentanan terhadap kekerasan dan diskriminasi
Pencegahan perkawinan anak	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan remaja
Peningkatan kepemimpinan perempuan	Memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan
Pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas	Meningkatkan akses terhadap kesempatan ekonomi dan pelayanan publik



d. Kesimpulan

Hasil Analisis Prioritas Masalah menunjukkan bahwa **kesetaraan gender merupakan determinan strategis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan karena memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia yang dimiliki**. Ketika perempuan memperoleh kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, akses pembiayaan, dan pengambilan keputusan, maka kapasitas ekonomi keluarga meningkat, ketahanan rumah tangga menjadi lebih kuat, dan risiko kemiskinan dapat ditekan secara signifikan.



Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan intervensi utama yang bertujuan meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penguatan kapasitas usaha, akses terhadap teknologi, pembiayaan, serta pasar. Pengembangan UMKM perempuan dan koperasi perempuan akan memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan nilai tambah produk berbasis potensi daerah. Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan menjadi sarana penting untuk meningkatkan kompetensi perempuan sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi dan memanfaatkan peluang usaha baru.

Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penyusunan anggaran responsif gender memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan memperhatikan kebutuhan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh kelompok masyarakat. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin juga menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengentasan kemiskinan. Pencegahan kekerasan berbasis gender, perlindungan korban, serta pencegahan perkawinan anak akan meningkatkan kesempatan perempuan untuk menyelesaikan pendidikan, memperoleh pekerjaan yang layak, dan membangun keluarga yang lebih sejahtera. Pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara inklusif dan tidak meninggalkan kelompok rentan.

Secara keseluruhan, Theory of Change Bidang Kesetaraan Gender menunjukkan bahwa penyediaan sumber daya (input), pelaksanaan aktivitas strategis (activities), pencapaian keluaran (output), dan perubahan kondisi sosial-ekonomi (outcome) akan menghasilkan dampak jangka panjang berupa meningkatnya kesejahteraan keluarga, berkurangnya ketimpangan gender, meningkatnya produktivitas ekonomi, serta menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender harus menjadi prinsip lintas sektor dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki serta memperkuat keberhasilan strategi penanggulangan kemiskinan.

4.1.5. Prioritas Intervensi Bidang Kesejahteraan Sosial

a. Analisis Prioritas Masalah (Determinan) Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Teori Perubahan (Theory of Change/ToC)

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan karena berfungsi sebagai **jaring pengaman sosial (social safety net)** yang melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat menyebabkan atau memperparah kemiskinan. Dalam perspektif pembangunan inklusif, kesejahteraan sosial tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, tetapi merupakan suatu sistem perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi kerentanan terhadap guncangan ekonomi, serta meningkatkan kemampuan untuk hidup secara mandiri.

Menurut pendekatan *social protection* yang dikembangkan oleh Bank Dunia, International Labour Organization (ILO), dan United Nations Development Programme (UNDP), perlindungan sosial merupakan investasi pembangunan yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pengurangan risiko, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan kesempatan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, kesejahteraan sosial harus dipandang sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar program bantuan.

Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu, kesejahteraan sosial memiliki peran yang sangat strategis mengingat karakteristik wilayah kepulauan menyebabkan sebagian masyarakat menghadapi



kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai risiko, seperti keterbatasan akses pelayanan dasar, fluktuasi pendapatan akibat ketergantungan pada sektor primer, bencana alam, perubahan iklim, serta keterbatasan kesempatan kerja. Kelompok masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar, perempuan kepala keluarga, masyarakat adat terpencil, dan kelompok rentan lainnya merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Analisis Determinan Kemiskinan menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga miskin tidak hanya mengalami keterbatasan pendapatan, tetapi juga menghadapi berbagai bentuk kerentanan multidimensi, antara lain rendahnya akses terhadap perlindungan sosial, terbatasnya kepemilikan aset produktif, lemahnya jejaring sosial, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta rendahnya kemampuan menghadapi guncangan ekonomi (*economic shocks*). Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mudah kembali jatuh ke dalam kemiskinan meskipun sebelumnya telah mengalami peningkatan kesejahteraan.

Selain itu, sistem perlindungan sosial yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan efektivitas berbagai program bantuan sosial belum optimal. Ketepatan sasaran, pemutakhiran data, koordinasi lintas sektor, serta sinergi antarprogram masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat agar bantuan sosial mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, prioritas intervensi bidang kesejahteraan sosial diarahkan tidak hanya pada pemberian bantuan sosial yang bersifat konsumtif, tetapi juga pada pengembangan **perlindungan sosial adaptif**, pemberdayaan masyarakat miskin, rehabilitasi sosial, peningkatan kapasitas keluarga, penguatan kelembagaan sosial, serta transformasi bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang tidak hanya terlindungi dari risiko sosial, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi.

b. Theory of Change (ToC) Bidang Kesejahteraan Sosial

Theory of Change Bidang Kesejahteraan Sosial dibangun berdasarkan asumsi bahwa **kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh tingginya tingkat kerentanan sosial yang menyebabkan masyarakat sulit keluar dari kemiskinan ketika menghadapi guncangan ekonomi, kesehatan, maupun bencana.**

Melalui penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif, terintegrasi, tepat sasaran, dan berbasis pemberdayaan masyarakat, diharapkan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai sekaligus meningkatkan kapasitasnya untuk hidup mandiri.